



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2023

**DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2022 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi ke depan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan IV Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

Dari 23 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diperoleh dua indikator kinerja belum mencapai target Triwulan IV tahun 2023. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan IV Tahun 2023 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 101,58%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Dari 23 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 15 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 7 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 15 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi, (2) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program, (3) Peluang investasi yang ready to offer, (4) Promosi usaha dan

investasi kelautan dan perikanan, (5) Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, (6) Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya, (7) Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi, (8) Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan, (9) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi, (10) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (11) Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (12) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi, (13) Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (14) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi dan (15) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 7 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, (2) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, (3) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, (4) UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir, (6) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi dan (7) Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Pada Triwulan IV Tahun 2023, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Usaha dan Investasi adalah sebesar Rp20.450.000.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp3.494.019.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp16.955.981.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.867.346.377,- atau setara dengan 82,48% terhadap total pagu anggaran awal atau 99,48% terhadap pagu anggaran pasca blokir. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp88.634.623,-.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dicapai selama Tahun 2023, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia.....	4
1.5. Permasalahan Utama	6
1.6. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja	19
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan.....	22
3.2.2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Peluang Investasi Yang <i>Ready to Offer</i>	25
3.2.3. Sasaran Strategis 3: Terlaksananya promosi usaha dan investasi	29
3.2.4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.....	33
3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan.....	39
3.2.6. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha.....	49
3.2.7. Sasaran Strategis 7: Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.....	69

3.2.8. Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	70
BAB IV. PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Rekomendasi	79
4.3. Tindak Lanjut atas rekomendasi triwulan III	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi..... 17

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023.....20

Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan IV Tahun 202322

Tabel 3.3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan IV Tahun 2023 24

Tabel 3.4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang *Ready to Offer* Triwulan IV Tahun 2023 25

Tabel 3.5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan IV 2023.....30

Tabel 3.6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan IV 202335

Tabel 3.7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan IV 202340

Tabel 3.8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan IV 2023..... 44

Tabel 3.9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan IV Tahun 2023.....50

Tabel 3.10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan IV Tahun 2023... 56

Tabel 3.11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) pada Triwulan IV Tahun 2023.....61

Tabel 3.12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan IV tahun 2023.....64

Tabel 3.13	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja <i>Startup</i> Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	67
Tabel 3.14	Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	70
Tabel 3.15	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	71
Tabel 3.16	Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023.....	72
Tabel 3.17	Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan IV Tahun 2023	73
Tabel 3.18	Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	74
Tabel 3.19	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023.....	74
Tabel 3.20	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan IV Tahun 2023.....	76
Tabel 3.21	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023.....	77
Tabel 3.22	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023	77
Tabel 3.23	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)	4
Gambar 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan	5
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	5
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan	6
Gambar 3.1	Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023	19
Gambar 3.2	Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi	23
Gambar 3.3	Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program	24
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Identifikasi peluang investasi pengolahan ikan di Kabupaten Pati Jawa Tengah.....	27
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Survei lapangan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Ready to Offer di Kabupaten Cilacap.....	27
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Workshop Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta	28
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi.....	31
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Forum Bisnis Peluang Usaha Ikan Hias di Indonesia pada Festival Ikan Hias Nusantara	32
Gambar 3.9	Dokumentasi Sail Teluk Cendrawasih	33
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bekasi.....	36
Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur	37
Gambar 3.12	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor	38
Gambar 3.13	Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar	39
Gambar 3.14	Rapat Sinergitas Pengembangan Usaha Masyarakat Desa di Bidang Kelautan dan Perikanan.....	42

Gambar 3.15	Dokumentasi Kegiatan rangkaian Puncak Peringatan Hari Ikan ...	52
Gambar 3.16	Dokumentasi Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha sektor kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat.....	53
Gambar 3.17	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Surakarta Dan Akses Permodala Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua	54
Gambar 3.18	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di kota Bogor, Kabupaten Bireun dan Kab.Sambas.	56
Gambar 3.19	Dokumentasi Kegiatan fasilitasi Pembiayaan di Pekalongan.....	58
Gambar 3.20	Dokumentasi Kegiatan Harkanas 2023	61
Gambar 3.21	Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Juknis GISELA dan Seleksi TPUKP.....	64
Gambar 3.22	Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial	69
Gambar 3.23	Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial di Jawa Barat.....	70
Gambar 3.24	Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 20 Juli 2023.....	76

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

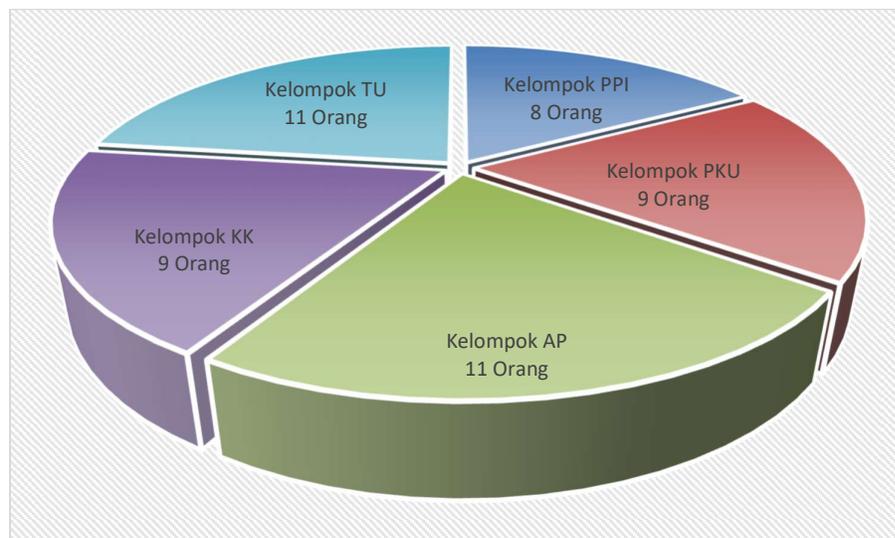
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

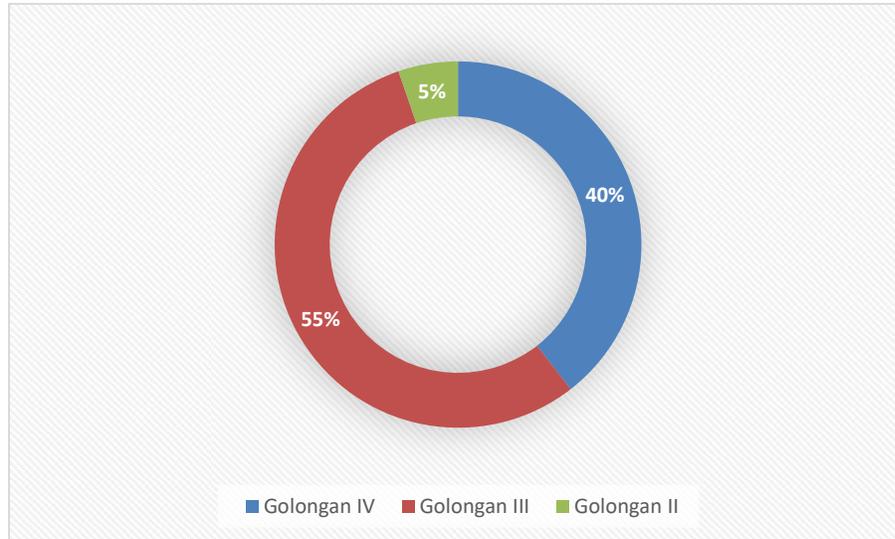
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berjumlah 49 orang, yang terdiri atas 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang tersebar di 4 Kelompok dan Kelompok Tata Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Kelompok Pemetaan dan Peluang Investasi (PPI) sebanyak 8 orang; Kelompok Pelayanan dan Kemitraan Usaha (PKU) sebanyak 9 orang; Kelompok Akses Permodalan (AP) sebanyak 11 orang; Kelompok Kewirausahaan dan Kelembagaan (KK) sebanyak 9 orang; dan Kelompok Tata Usaha sebanyak 11 orang.



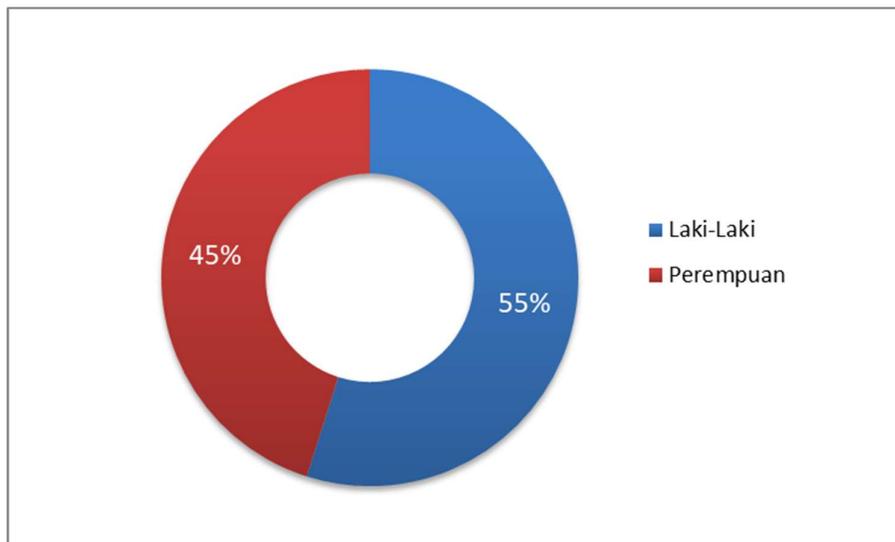
Gambar 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak pada golongan III, yakni 55%.



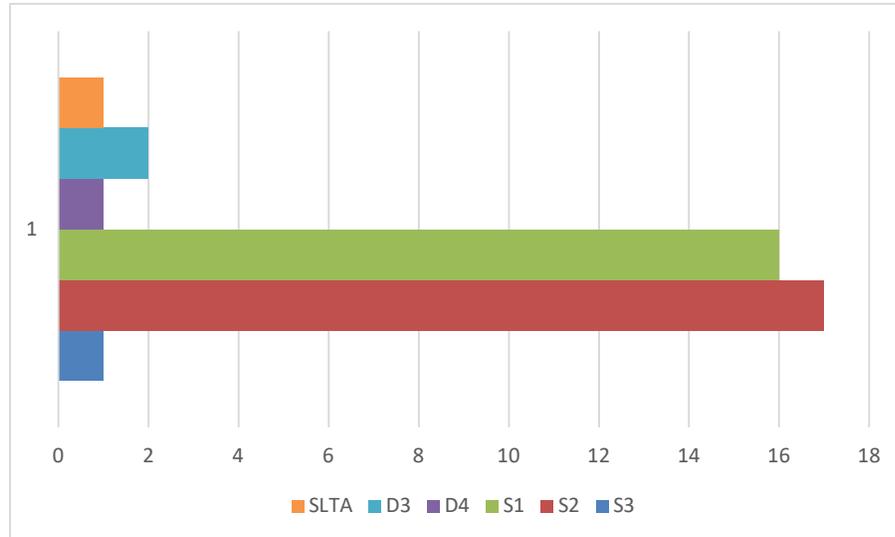
Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

3. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi.



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 16 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak dengan tingkat pendidikan S2, yakni mencapai 45%.



Gambar 1.4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2023, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan IV 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan IV Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan IV Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Usaha dan Investasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Usaha dan Investasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Usaha dan Investasi;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2023;
 - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 Triliun pada tahun 2023;
 - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
 - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
 - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
 - 2) penyusunan profil peluang investasi.
 - c. Klaster Daya Saing kelautan dan perikanan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Klaster Daya Saing produk kelautan dan perikanan

merupakan tempat pemusatan kegiatan industri perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Langkah operasional untuk mendukung strategi peningkatan kapasitas Klaster Daya Saing ini adalah:

- 1) Pembentukan Lembaga Klaster Daya Saing KP; dan
 - 2) Pengembangan Lembaga Klaster Daya Saing KP;
- d. Pemantuan dan pengendalian investasi. Strategi pemantuan dan pengendalian ini ditujukan untuk percepatan realisasi investasi melalui:
- 1) Pemantauan rencana dan realisasi serta tren investasi; dan
 - 2) Pengendalian investasi bila terjadi kendala dalam realisasi investasi.
- Dalam pemantauan dan pengendalian ini, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya.
2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan pengembangan kemitraan:
 - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
 - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
 - 3) Pendampingan dan monitoring.
 - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah. Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
 - 1) penjaringan calon debitur potensial,
 - 2) peningkatan kelayakan usaha,
 - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,

- 4) pendampingan manajemen usaha,
 - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
 - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
- c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
 - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
- c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
 - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
 - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
- d. Fasilitasi digitalisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.
- Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:
- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
 - 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
 - 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
 - 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
 - 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
 - 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
 - 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023.

Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi

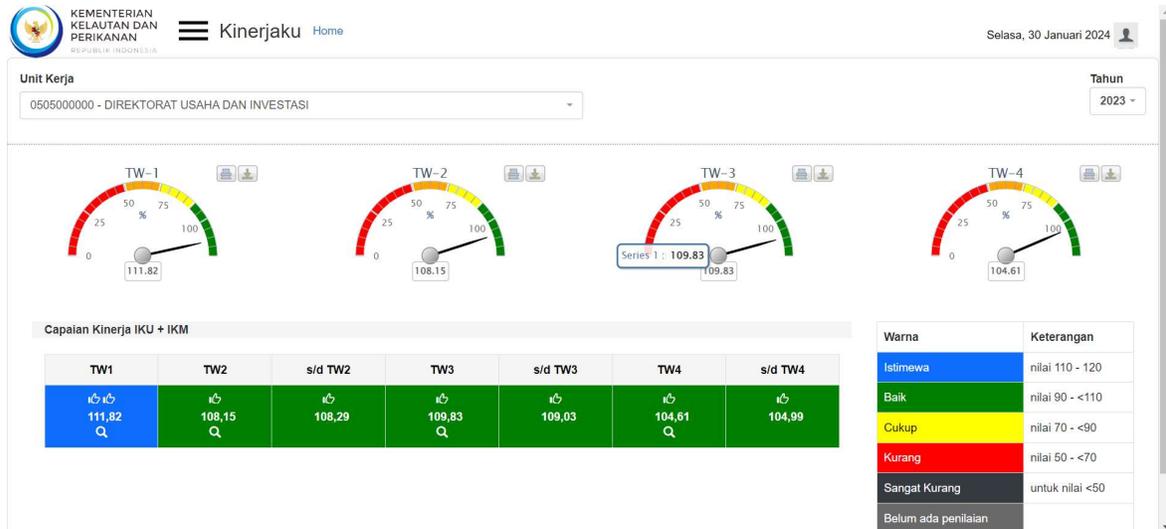
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2	Tersedianya peluang investasi yang ready to offer	3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	3
3	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	2
4	Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5	Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1
5	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	22
		7	Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	2
6	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	533
		9	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	317
		10	UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.635
		11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	53
		12	Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	4
7	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)	4.794
8	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		15	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2
		16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5
		17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	85

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
		20	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		21	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5
		23	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 104,61%, apabila di akumulasikan maka NPSS Direktorat Usaha dan Investasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 104,99%.

Direktorat Usaha dan Investasi pada Tahun 2023 menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan III Tahun 2023, terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi
Triwulan IV Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2023	TW IV	TW IV	Sd TW IV	% thd Target TW IV	% sd thd Target 2023
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	5	24,45	24,45	-	-
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	8	9,37	9,37	-	-
3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	3	-	1	3	100	100
4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	2	-	-	2	100	100
5	Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1	-	-	1	100	100
6	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	22	6	6	22	100	100
7	Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	2	-	1	2	100	100
8	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	533	183	203	553	110,92	103,75
9	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	317	17	17	351	100	110,72
10	UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.635	1.385	1.388	2.803	108,77	110,72
11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	53	2	2	63	100	106,37
12	Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	4	-	2	4	100	100

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2023	TW IV	TW IV	Sd TW IV	% thd Target TW IV	% sd thd Target 2023
13	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)	4.794	-	5.044	5.044	100	105,21
14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	-	82,33	82,33	100	109,77
15	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2	83,2	92,11	92,11	110,71	110,71
16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5	-	-	83,30	-	103,48
17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100	-	-	100	-	100
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75	75	99	99	132	132
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1	-	-	2	-	200
20	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	133,33	133,33	144,92	144,92
21	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95	-	-	99	-	104,21
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-	79,69	-	102,82
23	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-	97,50	-	125,80

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan

IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut baru dapat dihitung pada Triwulan IV, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan IV 2023 telah dilaksanakan perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi tersebut sebesar 24,45%, dimana jumlah pelaku usaha yang merealisasikan investasi pada tahun 2023 berjumlah 789 pelaku usaha dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah 634 pelaku usaha.

Apabila dibandingkan dengan periode pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 13,46%, kemudian pada tahun 2021 kembali sebesar 5%,

hingga pada tahun 2023 meningkat sebesar 24,45%, sehingga pertumbuhan rata-rata peningkatan persentase pelaku usaha yang melakukan investasi sebesar 14,30%.

Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target TA 2023	Realisasi TW IV 2023
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	24,45



Gambar 3.2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan.

IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2023 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2023. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 8%. Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan IV 2023 telah dilaksanakan perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan tersebut sebesar 9,37%, dimana jumlah pelaku usaha yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program pada tahun 2023 sebanyak 2.205 pelaku usaha dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah 2.016 pelaku usaha.

Apabila dibandingkan dengan periode pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 22,80%, kemudian pada tahun 2021 kembali sebesar 94,16%, hingga pada tahun 2023 meningkat sebesar 9,37%, maka pertumbuhan rata-rata peningkatan persentase pelaku usaha yang merealisasikan pembiayaan sebesar 42,11%

Tabel 3.3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target TA 2023	Realisasi TW IV 2023
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	9,37

rapat pimpinan perhitungan persentase tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi untuk membahas capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.



Gambar 3.3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer*

IK3. Peluang investasi Yang *Ready to Offer*

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan perbahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

Tabel 3.4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang *Ready to Offer* Triwulan IV Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		TW IV	TA 2023	TW IV	Capaian sd TW IV	% thd Target 2023
3	Peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3	3	2	3	100

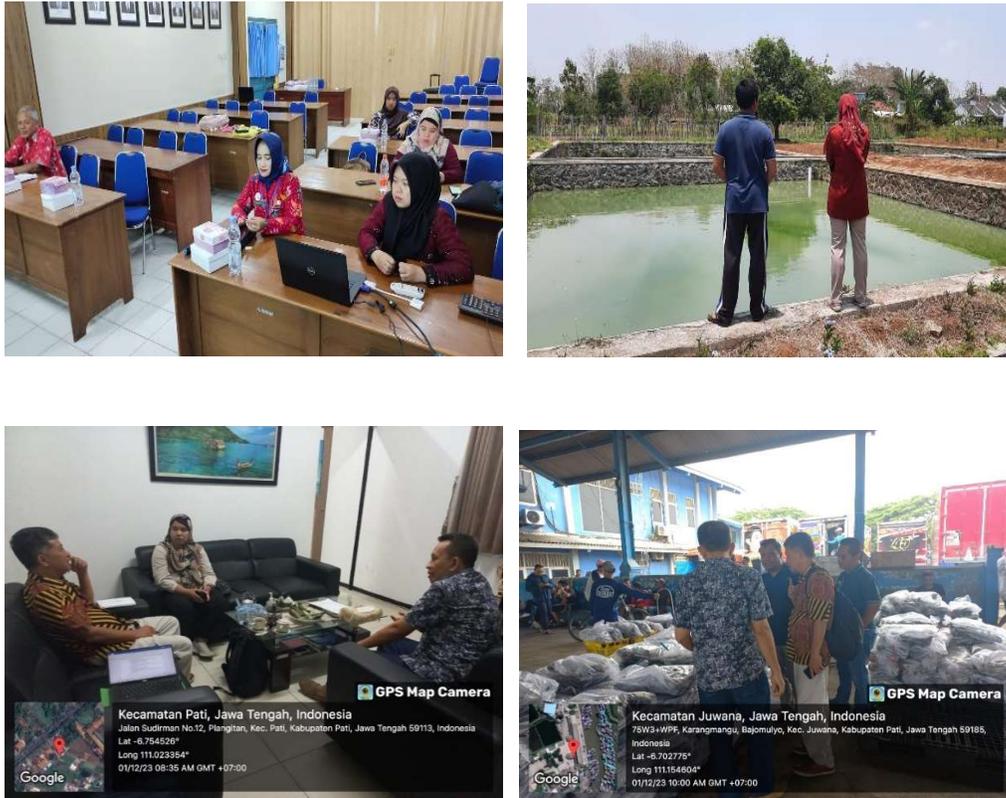
Pada tahun 2023 ditargetkan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* sebanyak 4 dokumen. Dikarenakan adanya *automatic adjustment* anggaran, maka

dilakukan penyesuaian target tersebut yaitu menjadi 3 dokumen. Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan IV tahun 2023 telah tercapai 2 (dua) dokumen atau mencapai 100% dari total capaian pada 2023 yakni 3 dokumen. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya, karena indikator kinerja peluang investasi yang *ready to offers* merupakan indikator kinerja baru pada tahun anggaran 2023.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Penyusunan Peluang Investasi Ready to Offer Usaha Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi
 - Hasil penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* usaha pengolahan rumput laut di Kabupaten Wakatobi sebagai berikut
 - 1) Wakatobi dengan perairan yang subur merupakan lokasi potensial bagi pengembangan usaha rumput laut. Adanya metode kultur jaringan menjamin *supply* produksi bibit rumput laut yang berkualitas. Adanya rumah pengering dapat meningkatkan mutu rumput laut kering sehingga dapat memenuhi permintaan industri.
 - 2) Lokasi, potensi dan status lahan yang akan ditawarkan yaitu di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan dengan luas 3 ha lahan milik Masyarakat.
 - 3) Target produksi yaitu Karagenan sebesar 750 ton/tahun dengan kebutuhan bahan baku *E.Cottonii* kering sebanyak 3000 ton/tahun. Potensi bahan baku yang tersedia pada tahun 2024 sebesar 10 ribu ton. Spesifikasi pabrik dengan kapasitas terpasang 750 ton karagenan/tahun luas lahan 14 ribu m² dan luas bangunan 2400 m².
 - 4) Hitungan kelayakan finansial didapatkan nilai investasi sebesar Rp 137,81 miliar dengan capex sebesar Rp 57,28 miliar dan opex sebesar Rp 80,52 miliar. IRR sebesar 28,56% dengan NPV sebesar Rp 81,09 miliar dan payback periode selama 5 tahun 2 bulan.
2. Identifikasi peluang investasi pengolahan ikan di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Peluang Investasi Sentra Industri Perikanan Terpadu di Juwana Pati yang ditawarkan di kawasan sentra industri yaitu a) Zona Pengembangan dengan luas 2,61 Ha yang diperuntukan untuk *cold storage*, industri pengalengan ikan dan industri pengolahan ikan, b) Zona reparasi kapal/docking luas 1,33 Ha dan c) Zona muat BB 0,18 Ha

(SPBUN dan SPDN). Peluang investasi yang ditawarkan terdiri dari budidaya pembesaran ikan nila yang tersebar di 7 kecamatan dan investasi usaha pembenihan nila di lokasi Balai Benih Ikan yang tersebar di BBI Brati (1,4 Ha), BBI Sukolilo (1,2 Ha), dan BBI Tlogowungu (1,8 Ha).



Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan Identifikasi peluang investasi pengolahan ikan di Kabupaten Pati Jawa Tengah

3. Survei lapangan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Ready to Offer di Kabupaten Cilacap

Lokasi yang siap ditawarkan kepada calon investor adalah di KPI Karangandri seluas 82 ha yang dikelola PT Cilacap Segara Artha (BUMD) dan yang dapat dimanfaatkan 67 ha. Amdal sudah tersedia untuk industri pengolahan ikan. Site plan di lokasi ini sudah tersedia, sudah ada jalanan drainase telekomunikasi. KPI Karangandri berjarak 1km dari laut. Air bersih diperoleh dari PDAM dengan debit air 550 liter / detik yang berasal dari PDAM IPA kesugihan. Listrik di lokasi ini PLN telah menyediakan 120 MVA 150 KV. Nantinya Kawasan ini akan memiliki sistem IPAL.

KPI Karangandri memiliki lokasi yang strategis yaitu hanya berjarak 9-12 km ke pelabuhan untuk ekspor.

Lahan berada di Kawasan Industri di Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan. Lahan milik PT Cilacap Segara Artha (Perseroda). Adapun lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Cold Storage adalah seluas 2 Ha. Lahan (lahan matang) dijual dengan harga Rp 1.500.000 per m².



Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan Survei lapangan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Ready to Offer di Kabupaten Cilacap

4. Workshop Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta

Workshop diselenggarakan pada 1 Desember 2023 di Cavinton Hotel Yogyakarta, dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi. Peserta workshop sebanyak 30 orang terdiri atas Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta Tenaga Pendamping Usaha Kota Yogyakarta dan Sleman. Narasumber workshop yaitu Tim Kerja Investasi dan Tim Indekstat konsultan Indonesia. Materi yang disampaikan pada workshop yaitu (i) Perhitungan dan analisis data investasi; (ii) Tahapan identifikasi peluang investasi; (iii) Penyusunan analisis kelayakan investasi; (iv) Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO); dan (v) Memo Info investasi. Hasil workshop yaitu daerah dapat mengidentifikasi dan menganalisis kelayakan peluang investasi kelautan dan perikanan dan diharapkan dapat berkolaborasi dengan DPMPTSP untuk menyusun IPRO.



Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Workshop Peluang Investasi

Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta

5. Penyusunan Peluang Investasi Ready to Offer Industri Pengolahan Udang di Kabupaten Cilacap

- Kegiatan dari penyusunan peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan udang di Kabupaten Cilacap adalah (1) mengidentifikasi kebutuhan investasi dasar dan infrastruktur pendukung usaha kelautan dan perikanan (Unit Pengolahan Udang); (2) menyusun analisis kelayakan peluang investasi kelautan dan perikanan. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen peluang investasi kelautan dan perikanan yang telah dinilai layak dan siap ditawarkan (*ready to offer*)
- Hasil penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan udang di Kabupaten Cilacap sebagai berikut
 - 1) Keunggulan pesisir Kabupaten Cilacap menjanjikan bisnis udang vaname. Kehadiran budidaya udang menjadi pendorong untuk menarik investasi industri pengolahan produk bernilai tambah.
 - 2) Lokasi, potensi dan status lahan yang akan ditawarkan yaitu di Kawasan Industri Cilacap, Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan dengan luas 2 ha lahan milik perseroda PT Cilacap Segara Artha. Skema yang ditawarkan adalah beli lahan dengan harga Rp 1,5 Juta per m²

6. Penyusunan Booklet peluang investasi usaha 5 komoditas yaitu udang, rumput laut, nila, kepiting dan lobster

Booklet yang disusun terdiri dari 5 komoditas yaitu udang, rumput laut, nila, kepiting dan lobster. Booklet menampilkan promosi produk. Target pembaca booklet adalah calon buyer dan investor. Booklet berisi keunggulan komoditas Indonesia, branding komoditas, ragam dan produk komoditas, peta sebaran produksi dan lokasi potensial, permintaan komoditas dunia, sertifikasi produk komoditas Indonesia, dukungan kemudahan berusaha, list industri pengolahan dan eksportir, dan informasi kontak. Booklet disajikan dalam 3 bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Mandarin.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja peluang investasi yang *ready to offer* pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp750.000.000,-,

hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp749.528.336,- atau setara dengan 99,94% dari total anggaran.

i. Sasaran Strategis 3

Terlaksananya promosi usaha dan investasi

IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor. Indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP merupakan target tahunan sehingga perhitungan capaian baru dilakukan pada saat penilaian akhir tahun anggaran 2023.

Tabel 3.5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan IV 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		TW IV	TA 2023	TW IV	Capaian sd TW IV	% thd Target 2023
4	Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan)	2	2	-	2	100

Kegiatan Promosi Usaha dan Investasi KP pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 kegiatan, namun dengan adanya *automatic adjustment* pada anggaran, maka dilakukan penyesuaian target tersebut yaitu menjadi 2 kegiatan. Pencapaian kegiatan promosi usaha dan investasi KP sampai dengan triwulan 4-2023 telah terlaksana sebanyak 2 kegiatan dengan persentase 100% dari target tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 kegiatan promosi usaha dan investasi memang mengalami penurunan sebesar

meningkat sebesar 33% dimana pada tahun 2022 kegiatan promosi terlaksana sebanyak 3 kali dan pada tahun 2024 hanya bisa dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan adanya Automatic Adjustment terhadap ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2023, sehingga dari target awal sebanyak 4 kegiatan promosi mengalami penyesuaian target menjadi 2 kegiatan promosi. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 kegiatan promosi usaha dan investasi belum menjadi indikator kinerja walaupun secara teknis kegiatan promosi tetap dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terlaksana sebanyak 2 kali.

Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV-2023 sebagai berikut:

1. Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi

Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi hilirisasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi kepada para pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan rumput laut. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Kemenkomarves, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, asosiasi rumput laut, pelaku usaha pengolahan dan eksportir rumput laut.



Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi

Hal yang didiskusikan pada kegiatan ini yaitu (i) Wakatobi dikenal sebagai daerah pariwisata, sehingga perlu di pikirkan kembali secara matang apabila ada pembangunan industri pengolahan rumput laut yang tidak mengelola limbah secara baik dapat mencemari lingkungan; (ii) Pemerintah telah melakukan intervensi hulu - hilir untuk pengembangan rumput laut di Wakatobi; (iii) Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Investasi/BKPM siap berkomitmen dan mendukung dalam mempromosikan dan menarik investasi ke Wakatobi.

2. Forum Bisnis Peluang Usaha Ikan Hias di Indonesia pada Festival Ikan Hias Nusantara Dalam rangka mendukung Kalikan Expo, Direktorat Jenderal PDS berpartisipasi pada Festival Ikan Hias Nusantara yang dilaksanakan di Epicentrum Walk Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2023. Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan bisnis forum peluang usaha ikan hias yang dihadiri oleh 100 orang terdiri dari pelaku usaha ikan hias, asosiasi, komunitas ikan hias dan perwakilan Dinas Perikanan Kab. Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang. Acara bisnis forum dibuka oleh Direktur Jenderal PDSPKP dengan narasumber secara paralel antara lain President Ornamental Fish International, Ketua Indonesia Tropical Fish Exporters Association INAFISH, KIPM Jakarta 1, Direktur Pemasaran KKP, dan Vice President of Product & Development Micro Business Development Division BRI.



Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Forum Bisnis Peluang Usaha Ikan Hias di Indonesia pada Festival Ikan Hias Nusantara

Hasil pertemuan forum bisnis yaitu (i) INAFISH mengajak para pelaku usaha ikan hias yang belum bergabung dalam asosiasi untuk dapat bergabung, karena kehadiran asosiasi selain untuk tumbuh bersama, juga dapat melakukan pendampingan dalam menjalankan ekspor; (ii) Sebagian besar pelaku usaha ikan hias merupakan pelaku usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan pengalaman bisnis. Untuk itu diperlu adanya workshop atau bimtek kepada pelaku usaha ikan hias; (iii) Pelaku usaha ikan hias mengapresiasi kehadiran KIPM Jakarta 1 untuk memberikan layanan konsultasi secara langsung, mengingat selama ini sejumlah pelaku usaha ikan hias yang melakukan ekspor kesulitan dalam memenuhi persyaratan ekspor.

3. Pameran Sail Teluk Cendrawasih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih, Direktorat Jenderal PDSPKP berpartisipasi pameran dan pelayanan publik melalui Pavilion KKP pada

STC Indonesia Maritime Expo dan Forum (SIMEF) yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 21-27 November 2023. Stand KKP, Ditjen PDSPKP menampilkan 6 desain poster dan brosur yaitu peluang investasi udang dan rumput laut, peluang investasi lobster dan tilapia, peluang investasi Biak, Sarmi, Yapen dan Waropen, Nilai Gizi Ikan, Unit Pelayanan Publik di Ditjen PDS dan Keuntungan berwirausaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Forum Bisnis “Penguatan Investasi Maritim Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia” diselenggarakan di KSL Grand Ballroom Biak pada tanggal 22 November 2023. Forum ini bertujuan untuk dapat meningkatkan minat investor untuk mengembangkan potensi investasi dan pariwisata di Indonesia Timur. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga dengan bantuan pemerintah pusat dapat mendatangkan para investor ke daerah. Forum ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha.



Gambar 6 Dokumentasi Sail Teluk Cendrawasih

4. Pendampingan rencana investasi PT. Indo Rama

Berminat investasi pembangunan pabrik pupuk biostimulan berbahan baku ulva dan telah melayangkan surat minat investasi ke Bupati Wakatobi, dengan nilai investasi kurang lebih 25 Milyar. Untuk realisasi minat investasi, PT Indo Rama masih membutuhkan waktu karena tim pengembangan masih melakukan kajian untuk mesin pengolahan rumput laut dan ujicoba untuk produk akhir yang akan dihasilkan. Fasilitasi pendampingan investasi yang telah dilakukan yaitu (i) Merekomendasikan

laboratorium yang dapat melakukan pengujian rumput laut. Berdasarkan hasil uji kualitas bahan baku rumput laut ulva, diperoleh hasil cukup baik dan memenuhi standar yang dipersyaratkan; (ii) Memfasilitasi pertemuan dengan pemda untuk membahas pemenuhan persyaratan dasar investasi berupa ketersediaan listrik. PT. Indo Rama berencana menyiapkan listrik *solar cell* namun membutuhkan ketersediaan lahan 1 Ha, dan mengharapkan lahan untuk solar cell dapat diakomodir oleh Pemda Wakatobi. Ditargetkan pada pertengahan Februari 2024 PT. Indo Rama akan melakukan survey kembali ke Wakatobi untuk menginvestarisir kesiapan rencana investasi dimaksud.

5. Pendampingan rencana investasi PT. Mitra Agro Global

PT Mitra Agro Global telah merealisasikan investasinya sebesar Rp. 1,1 Milyar pada akhir Oktober 2023 untuk pengembangan budidaya rumput laut di Morowali Utara, namun terjadi gagal panen karena adanya penyakit. Untuk menangani permasalahan di atas, telah difasilitasi pertemuan dengan ahli rumput laut di BBAT Takalar untuk mendapatkan pendampingan teknis. PT. Mitra Agro Global juga memiliki minat kerjasama investasi biostimulan rumput laut dengan Central Salt and Marine Chemicals Research Institute India (CSIR-CSMCRI), instansi ini tertarik untuk mengembangkan teknologi Biostimulan di Indonesia dengan perkiraan nilai investasi sebesar 2 Million USD. Direktorat Usaha dan Investasi saat ini masih menunggu proposal rencana bisnis sebagaimana poin c.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp2.086.981.000,-, Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp2.085.991.505,- atau setara dengan 99,95% dari alokasi anggaran.

ii. **Sasaran Strategis 4**

Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan

IK5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan

Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk memulai

dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena indikator kinerja ini baru di tahun 2023. Indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Sampai dengan Triwulan IV telah tercapai 1 rangkaian layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan hasil menerbitkan 80 surat izin pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Tabel 3.6. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan IV 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian TW IV	% Realisasi		Realisasi TW III 2022
		TW IV	TA 2023		TW IV	TA 2023	
5	Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1	1	1	100	100	-

Kegiatan Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV, meliputi:

1. Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sosialisasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Usaha dan Investasi maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan mengundang Direktorat Usaha dan Investasi sebagai salah satu pembicara, antara lain :

a. Sosialisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bekasi

Kegiatan Sosialisasi Pembinaan, Pengawasan Perizinan Berusaha ini di dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023 di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bekasi Komp. Pemda Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan *Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor KP*, diharapkan ini mampu mengajak masyarakat mengurus legalitas usahanya, biar dapat melanjutkan usaha yang bertanggung jawan dan memenuhi standar keamanan dan jaminan mutu hasil perikanan. Kemudahan berusaha ini untuk memudahkan pelaku usaha bisa mendapat fasilitas, pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, modal dan pembiayaan serta naik kelas menjadi pelaku usaha yang eksis dan dapat menjadi eksportir.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bekasi

- b. Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur
- Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyatukan visi dan misi terkait perizinan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis risiko. Adapun tujuannya adalah tersampainya informasi regulasi perizinan berusaha berbasis risiko pada sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan adalah terwujudnya sinergitas antara instansi, pelaku usaha/ stakeholder terkait perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis resiko melalui aplikasi OSS berbasis risiko (RBA). Sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa timur telah menerbitkan rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebanyak 347 rekomendasi pengajuan baru dan 87 rekomendasi perpanjangan. Pada tahun 2023 telah diterbitkan rekomendasi pemenuhan sertifikat standar sebesar 44 rekomendasi.

Kendala Pengajuan Sertifikat Standar

- a) Masalah teknis saat mengakses atau menggunakan platform OSS RBA.
- b) Kesulitan dalam mengunggah dokumen atau data yang diperlukan
- c) Kesulitan dalam pemenuhan izin dasar yang diajukan. Pastikan Anda telah melengkapi semua Persyaratan Dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d) Kesulitan dalam memahami persyaratan teknis skala usaha yang harus dipenuhi dalam dokumen.
- e) Perubahan aturan atau kebijakan yang dapat memengaruhi proses pengajuan sertifikat standar.
- f) Banyak izin yang belum terverifikasi dan banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan kegiatan usahanya (6 bulan)



Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur

- c. **Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor**
Acara sosialisasi dibuka oleh Kabid PDSPP Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor dan dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha dan penyuluh perikanan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bogor, seperti Ciawi, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur, dll. Kegiatan bertujuan untuk sosialisasi pembuatan NIB dan izin usaha bagi pelaku usaha perikanan lingkup Kabupaten Bogor. Dinas perikanan dan peternakan bertanggung jawab terkait sosialisasi

izin usaha bagi pelaku usaha sektor perikanan. Sebanyak 447 NIB pelaku usaha sub sektor pengolahan dan 687 NIB untuk sub sektor pemasaran ikan yang telah terbit di OSS.

Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengakses portal oss rba dan kesalahan-kesalahan dalam penginputan data kbli usaha yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara data KBLI dengan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh pelaku usaha dalam mengakses perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA.



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor

2. Penerbitan Sertifikat Standar

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar usaha selama periode triwulan IV 2023, telah dilaksanakan 3 (Tiga) rapat verifikasi, pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Adapun Selama periode Oktober - Desember 2023 telah diterbitkan 14 sertifikat standar kepada 9 pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan

Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar

3. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha telah dilakukan kunjungan lapangan ke UPI yang telah memiliki sertifikat standar di Bogor, UPI dimaksud adalah PT. Indonesia Bahari Lestari. PT. Indonesia Bahari Lestari merupakan perusahaan modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura dengan alamat kantor di Kebayoran Lama, Jakarta selatan dan pabrik di Ciawi Kabupaten, Bogor – Jawa Barat. Perusahaan ini mengajukan izin usaha untuk KBLI 10216 – industri berbasis daging lumatan dan surimi dengan produk akhir berupa otak-otak. Perusahaan memiliki kapasitas cold storage sebesar 30 ton sebanyak 2unit. Asal bahan baku frozen surimi berasal dari Tegal dan pekalongan kemudian tujuan pemasaran produk ke khusus dalam negeri, Nilai investasi yang tercatat dalam rencana usaha yang diajukan sebesar Rp 15,5 Miliar. Perusahaan memiliki tenaga kerja sebesar 150 orang yang tercatat dalam rencana usaha, semua tenaga kerja lokal.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah Rp655.000.000,-, Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp651.687.343,- atau setara dengan 99,49% dari alokasi anggaran.

iii. Sasaran Strategis 5

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan

IK6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada Indikator kinerja ini yang dimaksud Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2023 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

Tabel 3.7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan IV 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV 2023	% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023		TW IV 2023	Tahun 2023	

6	Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya	6	22	6	100	100	30
---	---	---	----	---	-----	-----	----

Target Lembaga usaha yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2023 sebanyak 35 lembaga, namun dengan adanya *automatic adjustment* pada anggaran, maka dilakukan penyesuaian target tersebut menjadi 22 lembaga. Realisasi capaian jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 6 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika diakumulasikan sampai dengan TW IV maka realisasi lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan sebanyak 22 lembaga usaha, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 22 lembaga usaha, maka sudah tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 triwulan IV, capaian lembaga usaha yang tercapai 30 lembaga usaha, maka terjadi penurunan sebesar 22,66% akibat dari adanya *automatic adjustment*. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya belum menjadi indikator kinerja walaupun secara teknis kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan capaian 5 lembaga pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tercapai sebanyak 12 lembaga. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pada triwulan IV, antara lain:

1. Rapat Sinergitas Pengembangan Usaha Masyarakat Desa di Bidang KP pada tanggal 5 Oktober 2023 di Jakarta.

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Dit. Usaha dan Investasi dan secara Daring (via Zoom) pada tanggal 5 Oktober 2023. Pimpinan rapat Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DDTT) – Kementerian DDTT beserta Tim, perwakilan dari Sesditjen PDSPKP dan Dit. Pemasaran. Tujuan rapat adalah pembahasan kerjasama dan peran Bumdes dalam pengembangan usaha kelautan dan Perikanan. Tindak Lanjut dari rapat ini adalah : a) Perlunya konsolidasi penyuluh perikanan pada Musrebang Desa untuk memberikan informasi dan masukan terkait usaha di bidang KP. Sehingga usaha KP dapat dijadikan pengembangan bidang usaha pada Bumdes; b) Identifikasi lokasi pilot project untuk sinergitas Bumdes dengan Kelompok/Koperasi

Usaha Perikanan; c) Penetapan lokasi pilot project untuk sinergitas Bumdes dengan Kelompok/Koperasi Usaha Perikanan; dan d) Finalisasi rencana aksi (terlampir)



Gambar 3.15 Rapat Sinergitas Pengembangan Usaha Masyarakat Desa di Bidang Kelautan dan Perikanan

2. Monitoring progress dan persiapan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Pulau Pasaran – Bandar Lampung.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2023 dan dibagi dalam 2 (dua) sesi yaitu pelatihan administrasi serta Teknik pembuatan laporan keuangan koperasi dan penyusunan rencana bisnis koperasi. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah : a) Pendampingan pengajuan SKP, HACCP, dan *Approval Number* koperasi, setelah fasilitas rumah pengering dan coldstorage selesai dibangun; b) Monitoring pengiriman sampel produk oleh koperasi ke PT. JPN untuk dikirim ke calon *buyer*, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung untuk pengujian kadar garam dan air; c) Hal – hal lain yang perlu ditindaklanjuti akan dikordinasikan dengan unit terkait (Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, Dit. Pemasaran dan BBP3KP).

3. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6-11 Nopember 2023 di Kabupaten Jepara.

Dalam rangka Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan di Kab. Jepara, laporan yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Audiensi dengan Forum Komunikasi (Forkom) Nelayan Rajungan Nusantara
 - a. Audiensi dihadiri oleh perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi, Dinas Perikanan Kab. Jepara, Sustainable Fisheries Partnership (SFP), dan pengurus dan anggota Forkom. Tujuan dari audiensi adalah rencana pembentukan dan pengembangan koperasi nelayan rajungan, yang merupakan anggota Forkom.
 - b. Forkom Nelayan Rajungan Nusantara beridiri pada tahun 2020, sampai saat ini anggota sebanyak 1.500 orang (Nasional). Para anggota berasal dari Jepara, Rembang, Pati, Lamongan, Demak, Maros, dan Pangkep. Khusus Forkom simpul Jepara, anggota terdiri dari 290 anggota, yang memiliki usaha nelayan rajungan dan melakukan restocking untuk keberlanjutan produksi rajungan.
 - c. Rencana usaha koperasi adalah pemasaran hasil produksi, penyediaan alat tangkap dan umpan, dan pengolahan rajungan (Miniplant).



2. Monitoring dan evaluasi Koperasi Bumi Kartini Mina
 - a. Monitoring dan evaluasi koperasi binaan “Koperasi Bumi Kartini Mina” Kab. Jepara. Usaha utama adalah memasok kebutuhan ikan para anggota 34 orang (para bakul ikan) yang diperoleh disekitar PPI Ujung Batu atau mendatangkan dari daerah lain, seperti Lamongan dan Juwana.
 - b. Kendala adalah masih kurangnya kapasitas SDM dalam melakukan pencatatan dan pelaporan koperasi



Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp Rp769.061.342,- atau setara dengan 98,47% dari total pagu sebesar Rp781.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp11.938.658,- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 98,47%.

IK7. Lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diperlukan strategi pelaksanaan arah kebijakan diantaranya adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan usaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan yang diintegrasikan hulu – hilir dalam model sebuah Klaster Daya Saing.

Klaster daya saing ini merupakan kumpulan dari berbagai unit usaha kelautan dan perikanan yang berhubungan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan difasilitasi program pengembangan usaha agar memiliki daya saing SDM, produk, dan perusahaan, serta mampu mengangkat daya saing daerah dan nasional. Klaster daya saing merupakan salah satu model kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN dan berkelanjutan usaha pada usaha sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dilaksanakannya Klaster Daya Saing adalah untuk penguatan daya saing di suatu kawasan tertentu dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dan/atau pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan dalam menjalankan

usaha yang mandiri, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pada tahun 2023 kegiatan Klaster Daya Saing terdiri atas pembentukan lembaga klaster daya saing dan pengembangan lembaga klaster daya saing. Lembaga klaster daya saing merupakan lembaga usaha yang mampu menggerakkan atau mengelola kawasan klaster daya saing di lokasi tertentu. Target lembaga usaha yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada awalnya sebanyak 3 lembaga, namun dengan adanya *automatic adjustment* maka Direktorat Usaha dan Investasi menyesuaikan target tersebut menjadi 2 lembaga. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena indikator kinerja ini baru di tahun 2023

Tabel 3.8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan IV 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023	TW IV 2023	Sd TW IV 2023	TW IV 2023	Tahun 2023	
7	Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	-	2	1	2	-	100	-

Capaian kinerja pada Triwulan IV terealisasi sebanyak 2 lembaga atau setara dengan 100% dibandingkan dengan target tahun 2023. Adapun rincian dari capaian tersebut adalah :

1. Lembaga yang bersedia untuk mengelola KDS di Konawe Selatan telah ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 523/002/KDS/2023
2. Lembaga yang bersedia untuk mengelola KDS di Sambas telah ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Nomor 523/273/KDS/2023.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, beberapa kegiatan yang mendukung capaian tersebut telah dilaksanakan yaitu:

1. Rapat Tim Teknis Klaster Daya Saing pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan hasil rapat sebagai berikut:

- a) Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Kelembagaan dan dihadiri oleh perwakilan Dit. Logistik, BBP3KP, Dinas Perikanan Kab. Konawe Selatan, DKP Kab. Sambas, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya-DJPBD Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan-DJPBD serta perwakilan Timja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi.
- b) Tujuan rapat ini untuk membahas inventarisasi kebutuhan pelaku usaha sesuai dengan juknis bantuan pemerintah dari Ditjen PDSPKP dan Ditjen Perikanan Budidaya.
- c) Bantuan pemerintah DJPBD untuk tambak tradisional lebih difokuskan untuk sarana pendukung seperti pakan, benur dan irigasi.
- d) Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti:
 - Kesepakatan lokasi tertentu sebagai *pilot project* dalam mengembangkan KDS
 - Mengusulkan Kab. Konawe Selatan sebagai kampung budidaya udang, karena sebelumnya kabupaten ini ditetapkan sebagai kampung budidaya rumput laut
 - Dinas memberikan usulan/proposal kepada Ditjen PDSPKP dan Ditjen Perikanan Budidaya terkait bantuan pemerintah



2. Fasilitasi Kemitraan Lembaga Usaha KDS dengan Efishery, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 17 Oktober 2023, telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan antara Koperasi yang tergabung dalam KDS dengan Efishery. Kegiatan dipimpin oleh Timja Kelembagaan dan dihadiri oleh perwakilan dari Efishery, Dit. Produksi dan Usaha Budidaya-DJPB, BBP3KP, Dinas Perikanan Kab. Konawe Selatan, Penyuluh, TPUKP dan anggota Koperasi Samaturu Sumber Rezeki, Koperasi Tambak Nusantara, Koperasi Produsen Putra Salo Raya, Koperasi Nur Rezky

Hidayah, Koperasi Purnama Jaya Mandiri dan Koperasi Padaidi Sito Jaya. Hasil kegiatan ini adalah Tim dari e-Fishery menyampaikan besarnya peluang kerjasama dengan pihak Efishery, baik yang tergabung dalam koperasi maupun pokdakan dengan syarat sudah memiliki KK, KTP, Cara Budidaya yang Baik (CBIB) dan rekomendasi dari ketua koperasi atau ketua pokdakan tersebut.

- b) Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara e-Fisheries dengan Dinas Perikanan Kab. Konseil sebagai mediator, sehingga ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder khususnya di Kab.Konseil untuk mendorong pertumbuhan/produktivitas usaha budidaya.



- c. Pada tanggal 18 Oktober 2023, kegiatan dilanjutkan dengan Pengembangan Lembaga Usaha KDS. Kegiatan dipimpin oleh Kabid Penguatan Daya Saing Kab. Konawe Selatan, dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Konawes Selatan, Pengurus Kecamatan Tinanggea, Dinas Perikanan Kab. Konawe Selatan, Penyuluh, TPUKP dan pengurus Koperasi Samaturu Sumber Rezeki, Koperasi Tambak Nusantara, Koperasi Produsen Putra Salo Raya, Koperasi Nur Rezky Hidayah, Koperasi Purnama Jaya Mandiri dan Koperasi Padaidi Sito Jaya.



3. Pengembangan kelembagaan KDS di Kab. Samsas.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Samsas dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samsas, Efishery, Penyuluh, TPUKP, pembudidaya dan pengolah di sekitar Kab. Samsas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam pengelolaan administrasi, tata kelola dan pelaporan keuangan koperasi untuk peningkatan dan keberlanjutan usaha. Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi di kantor Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Samsas terkait bantuan pemerintah.



4. Rapat Tim Teknis Klaster Daya Saing pada tanggal 27 November 2023, yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring).

Rapat dihadiri oleh Ibu Innes Rahmania (Pembina Mutu Utama), perwakilan Setditjen PDSPKP, Dit. Usaha dan Investasi, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, Dit. Logistik, Dinas Perikanan Kab. Konawe Selatan, dan Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas. Tujuan rapat adalah untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 di lokasi KDS, yaitu Kab. Konawe Selatan dan Kab. Sambas.

a) KDS Kab. Konawe Selatan (Konsel)

Telah ada kemitraan usaha antara Dinas Perikanan Kab. Konsel dengan eFishery, bertujuan untuk pengembangan usaha pembudidaya. Telah dilakukan sosialisasi eFishery di 3 lokasi terkait produk/jasa yang ditawarkan kepada pembudidaya, seperti penyediaan benih, pakan, dan pembiayaan (kabayan). Saat ini sedang proses pengumpulan KTP di 3 lokasi tersebut. Proses pelaksanaan menunggu sampai musim kemarau selesai, karena terkendala rendahnya debit air. Rencana pendekatan KDS kedepan dengan pendekatan pilot project agar dapat diukur pencapaiannya. Untuk itu perlu ditetapkan lokasi dan pelaku usaha/koperasi yang akan dijadikan target pilot project.

b) KDS Kab. Sambas

Telah terbentuk Tim KDS di Kab. Sambas, dengan dua lokasi pilot project yang telah disepakati, yaitu Kec. Paloh dan Kec. Pemangkat. Terjalin kemitraan antara Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas dengan eFishery pada November 2023. Kerjasama terkait pembiayaan (Kabayan), dengan tujuan peningkatan produksi. Perlu dilakukan sosialisasi lebih detail kepada para pembudidaya tentang skema pembiayaan. Pengembangan KDS di Konsel dan Sambas, berikutnya menggunakan pendekatan pilot project agar mudah mengukur tingkat perkembangan dan keberhasilannya.



Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp576.078.647,- atau setara dengan 96,82% dari total pagu sebesar Rp595.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 96,82%.

iv. Sasaran Strategis 6

Terlaksananya fasilitas dan pembinaan usaha

IK8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2023 semula ditargetkan sebanyak 585 wirausaha, karena adanya penyesuaian anggaran maka target tahun 2023 menjadi 533 wirausaha. Pada triwulan IV tahun 2023 target yang ditetapkan sebanyak 183 UMKM/wirausaha dan realisasi capaian pada TW IV yaitu sebanyak 203 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 110,93% terhadap target. Secara akumulatif, capaian wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina sampai dengan triwulan IV mencapai 553 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 103,75% terhadap target tahun 2023 sebanyak 533 UMKM/Wirausaha. Capaian kewirausahaan tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian wirausaha terdiri dari 2 komponen kegiatan yaitu wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan dan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan akses pembiayaan sedangkan pada tahun 2022 hanya 1 komponen yaitu wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan. Namun dapat diinformasikan bahwa capaian wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan pada tahun 2022 sebanyak 201

wirausaha, pada tahun 2021 sebanyak 46 wirausaha dan pada tahun 2020 sebanyak 40 wirausaha.

Tabel 3.9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV 2023	% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023		TW IV 2023	Tahun 2023	
8	Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM)	183	533	203	110,93	103,75	201

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan IV 2023, meliputi:

1. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Jabodetabek, dilaksanakan tanggal 19-21 November di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dengan tema "Ikan untuk Generasi Emas" merupakan pertemuan talk show digitalisasi usaha dan fasilitasi akses pembiayaan, dimana inti dari kegiatan ini adalah untuk mengusung peran Digitalisasi dan Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Usaha Kelautan dan Perikanan dalam bentuk penyerahan simbolis bantuan kredit dan akte pendirian koperasi, diskusi peran digitalisasi usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan.. Talk show ini dilaksanakan dalam rangkaian Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas). peringatan Harkannas terdiri dari talkshow, Rakornas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN), Pasar Ikan Murah, Pameran Produk Unggulan Daerah, Lomba Masak Ikan Serta Ikan (LMSI) tingkat nasional, pojok konsultasi perizinan, aktifitas melalui berbagai media sosial *e-flyer*, *e-poster*, video teaser, dan berbagai acara hiburan





Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan rangkaian Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas)

2. Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha sektor kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha pemula di Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 18 Desember 2023. kegiatan ini diselenggarakan secara *hybrid*, dengan peserta *daring* mencapai 120 orang dan peserta *luring* 80 orang. Peserta tersebut terdiri dari : wirausaha baru/pemula binaan TPU-KP; startup perikanan beserta UMKM calon binaannya; koperasi perikanan; seluruh TPU-KP dari 34 Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk Mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis, Memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan, Memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah dan BUMN/BUMD dan Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut, salah satunya yaitu perlu dilakukan pembinaan untuk wirausaha pemula dan tidak berhenti hanya karena sudah memiliki NIB. Pembinaan lanjutan diperlukan untuk memacu perkembangan wirausaha pemula menuju wirausaha mapan.



Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha sektor kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat

3. Pembinaan dan pendampingan untuk pelaku usaha pengolahan perikanan melalui kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan yang telah dilakukan di Kabupaten Biak, Provinsi Papua. pada tanggal 15 November 2023. Hadir sebagai peserta adalah wirausaha/calon wirausaha di Kampung nelayan maju Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pendukung program hilirisasi Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di Kabupaten Biak – Papua dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam bidang kewirausahaan dan akses pembiayaan.



Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Dan Akses Permodala Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

- Monitoring dan evaluasi wirausaha dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023, dan diselenggarakan secara *hybrid*, dengan peserta *daring* mencapai 120 orang dan peserta *luring* 80 orang. Peserta tersebut terdiri dari : wirausaha baru/pemula binaan TPU-KP; startup perikanan beserta UMKM calon binaannya; koperasi perikanan; seluruh TPU-KP dari 34 Provinsi dengan tujuan monitoring dan evaluasi wirausaha dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pengolahan perikanan yang telah diberikan dalam pembinaan dan pendampingan. Tujuan monitoring dan evaluasi wirausaha dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pengolahan perikanan yang telah diberikan dalam pembinaan dan pendampingan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah terkait wirausaha didorong memiliki NIB, Pemenuhan perizinan usaha (selain NIB) dan sertifikasi produk untuk menunjang pemasaran produk wirausaha pemula, Pelatihan

wirausaha ekspor untuk wirausaha pemula yang paling potensial, fasilitasi kemitraan antara wirausaha pemula dengan wirausaha mapan atau usaha skala menengah besar, Wirausaha pemula diharapkan dapat melakukan usaha yang layak secara ekonomis sehingga dapat mengakses kredit program untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Adapun terkait legalitas produk dapat secara aktif menghubungi dinas teknis yang menangani seperti dinas Kesehatan untuk PIRT. Terkait pengelolaan usaha wirausaha saat dilakukan pembinaan telah disampaikan agar memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha, melakukan pencatatan keuangan sederhana, melakukan pencatatan stok produk dan bahan baku, dan sebagainya.



5. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Bireun, Sambas, Bogor, Bandarlampung, Samarinda, Banyuasin, Kupang, Wonosobo, Batubara, Kapuas Hulu, Nganjuk, Pesisir Selatan, Jenepono, Lampung Timur, Serang, Majene Tengah, Alor, Bone, Pangkalan Bun, Ciamis, Sukabumi, Ponorogo, Denpasar, Cianjur, Karawang, dan Kabupaten Sorong. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat, Lembaga Keuangan Setempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Hadir sebagai peserta pelaku usaha yang terdiri atas pembudidaya ikan air tawar, nelayan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan setempat. Pada kegiatan bimtek ini KKP juga bekerjasama dengan DPMPSTSP setempat mengadakan gerai layanan Perizinan yaitu berupa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB); serta perwakilan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terkait

pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Selain itu, juga dihadirkan narasumber dari lembaga keuangan perbankan (BRI dan BNI) dalam rangka sosialisasi akses pembiayaan usaha; serta narasumber dari praktisi manajemen/UMKM teladan/wirausaha mapan yang menyampaikan materi terkait manajemen usaha mikro kecil, *success story*, dan memberikan motivasi kepada calon wirausaha kelautan dan perikanan. Wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pembinaan pada triwulan IV tahun 2023 terlampir.



Gambar 3.15 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di kota Bogor, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Sambas

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp6.661.914.644,- atau setara dengan 99,80% dari total pagu sebesar Rp6.675.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 110,93% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,80%.

IK9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan

perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit program adalah jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya, baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Tabel 3.10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi	
		TW IV	TA 2023	TW IV	Sd TW IV	TW IV 2023	Tahun 2023
9	UMKM Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program (UMKM)	17	317	17	351	100	110,73

Indikator Kinerja UMKM Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 500 UMKM, namun dengan adanya *automatic adjustment* pada anggaran, maka dilakukan penyesuaian target menjadi 317 UMKM. Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada triwulan IV tahun 2023 adalah 17 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan IV tahun 2023 sebanyak 17 UMKM, Secara akumulatif, capaian kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 351 UMKM atau setara 110,73% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 317 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Fasilitasi akses pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank di lokus-lokus prioritas KKP. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program pada triwulan IV tahun 2023 antara lain:

1. Terlaksananya Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Pekalongan

Kegiatan ini merupakan sinergi Direktorat Usaha dan Investasi dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kebumen dan Rembang agar dapat naik kelas melalui pemenuhan perizinan berusaha, akses permodalan, dan peningkatan kualitas produk melalui pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sesuai dengan tema kegiatan "Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan siap naik kelas". Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Pekalongan

Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Direktorat Usaha dan Investasi yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan, Kepala Cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Tegal, Camat Wonokerto, dan menghadirkan kurang lebih 120 peserta pelaku usaha perikanan yang terdiri dari: perwakilan pengolah, pemasar, dan pembudidaya ikan dari 6 Desa di Kecamatan Wonokerto (Desa Bebel, Desa Siapi-api, Desa Wonokerto Kulon, Desa Pecakaran, Desa Trateban, Desa Cijambe), dan Koperasi pengolah dan pemasar di Kecamatan Siwalan (Desa Mejasem), Camat Wonokerto, 6 Kepala Desa, petugas penyuluh bantu, serta tamu undangan Direktur PT. Vitosindo Inti Boga, Ketua bidang industri yang Mewakili Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) DPD DKI Jakarta dan Dirut PT. Cahaya Putera Multirasa.

- b. Materi edukasi yg disampaikan para narasumber meliputi: a) Literasi Keuangan dan sosialisasi pembiayaan oleh PT. PNM cabang Pekalongan; b) Perizinan berusaha oleh Direktorat Usaha dan Investasi; c) Pentingnya SKP dalam menjamin keamanan produk oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.



Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan fasilitasi Pembiayaan di Pekalongan

Kegiatan juga diisi dengan acara penyerahan simbolis bantuan pemerintah berupa:

- Pembiayaan Mekaar PNM untuk pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Pekalongan (4 orang)

Nama Nasabah	Plafon Pembiayaan (Rp)	Bidang Usaha
Ruslina	3.000.000	Ikan Asin
Ruainah Binti Suja'i	5.000.000	Ikan Asin
Siti Rahayu Binti Dalari	4.000.000	Ikan Asin
Uswatun Khasanah Binti Prayitno	4.000.000	Ikan Asin

- Bedah UPI kepada pengolah dan pemasar ikan Kab. Pekalongan kepada Poklahsar Mina Lestari Bugangan
 - Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Poklahsar Mina Lestari Bugangan
 - Sertifikat Halal kepada pengolah dan pemasar ikan Duratno Wibowo, Sutarto dan R. Edi Sedyono
 - Kartu Layanan e-KUSUKA kepada pengolah dan pemasar Zahrotul Warda dan Nur Fadlilah
 - Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara PT Vitosindo Inti Boga, PT Kulina Berkah Sejati, PT. Cahaya Putera Multirasa dengan Poklahsar Bebel Mina Rizki dan Poklahsar Anugrah Ulam Bebel tentang Kerjasama Pemasaran Produk Olahan Ikan
2. Rapat koordinasi data pembiayaan antara Ditjen PDSPKP dengan OJK dan Kemenkeu.

Dalam rangka penyediaan data realisasi kredit program di sektor kelautan dan perikanan, pada tanggal 17 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Direktorat Usaha dan Investasi, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Seluruh permintaan data dari *stakeholder* kepada OJK per bulan Agustus 2023, akan dilayani oleh Departemen Pengelolaan Data dan Statistik. Termasuk data kredit perbankan yang sebelumnya dikelola oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

- b. KKP dapat mulai melakukan ujicoba *uploading* data pada SIKP menggunakan data KUSUKA sesuai format data SIKP. Data yang berhasil diupload dapat dimonitor oleh KKP terkait perkembanganajuan KUR per masing-masing pelaku usaha.

3. Keikutsertaan Dalam Harkanas Tahun 2023

Hari Ikan Nasional (Harkannas) diperingati setiap tanggal 21 November sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional. Pada tahun 2023, peringatan Harkannas akan dilaksanakan tanggal 19-21 November di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dengan tema "Ikan untuk Generasi Emas". Rangkaian peringatan Harkannas terdiri dari talkshow, Rakornas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN), Pasar Ikan Murah, Pameran Produk Unggulan Daerah, Lomba Masak Ikan Serta Ikan (LMSI) tingkat nasional, pojok konsultasi perizinan, aktifitas melalui berbagai media sosial *e-flyer*, *e-poster*, video teaser, dan berbagai acara hiburan.

Peran Direktorat Usaha dan Investasi pada Harkanas 2023 adalah menyelenggarakan Talkshow dengan Topik Peran Digitalisasi dan Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Usaha Kelautan dan Perikanan. Output dari kegiatan tersebut adalah :

- i. Penyerahan simbolis bantuan kredit pembiayaan dan akte pendirian koperasi sebagai berikut:
 - a. Realisasi pinjaman dari PT BNI dan PNM kepada pelaku usaha KP. Realisasi kredit dari BNI senilai R1.007.000.000,- kepada PT Rantai Pasok Teknologi dan Rp5.000.000.000,- kepada PT Java Kayana Segara kemudian dari PT. PNM senilai Rp9.000.000,- kepada Kiki Aminah, usaha pengolahan dan pemasaran kerang hijau dan Samriyah, usaha pemasaran ikan segar dengan Nilai kredit Rp7.000.000,-
 - b. Penyerahan Akte pendirian koperasi dalam rangka pengembangan kelembagaan kepada Koperasi Bandar Kidul Maju Sejahtera.
- ii. Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal PDSPKP dengan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani tentang "Sinergi Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Sektor Kelautan dan

Perikanan” antara Direktorat Jenderal PDSPKP dengan PT Permodalan Nasional Madani. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka sinergi program pemberdayaan usaha ultra mikro sektor kelautan dan perikanan. Adapun ruang lingkup perjanjian ini meliputi : 1) Berbagi pakai Data dan/atau Informasi; 2) Pemanfaatan fasilitas layanan pembiayaan usaha produktif sektor kelautan dan perikanan; dan 3) Pengembangan ekosistem usaha produktif sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 3.28 Dokumentasi Kegiatan Harkanas 2023

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp536.000.000,-, hingga triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp535,056,875,- atau setara dengan 99,82% dari total anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 110,73% melebihi persentase realisasi anggaran sebesar 99,82%.

IK10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela)

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela oleh TPUKP meliputi: (1) Fasilitasi Pembiayaan, (2) Fasilitasi Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan.

Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan oleh TPUKP untuk mengakses pembiayaan pada periode berjalan, baik pendampingan fasilitasi pembiayaan ke lembaga keuangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha yang menjadi salah satu syarat untuk mengakses pembiayaan, penguatan kelembagaan, maupun kemitraan. UMKM yang menjadi target untuk mendapatkan layanan GISELA adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor usaha kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu seperti usaha budidaya, penangkapan dan pergaraman sampai ke sektor hilir seperti pengolahan dan pemasaran serta jasa di bidang kelautan dan perikanan seperti jasa perbaikan kapal dan jaring nelayan dan lainnya. Realisasi jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, selain menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan (realisasi akad kredit), namun mencakup UMKM yang didampingi untuk mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha), penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

Tabel 3.11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023	TW IV	Sd TW IV	TW IV 2023	Tahun 2023	
10	UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) (UMKM)	1.385	2.635	1.388	2.803	100,22	106,37	2.592

Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2.135 UMKM, namun dengan adanya pengembalian dana Dekosentrasi kepada pusat, maka dilakukan penyesuaian target menjadi 2.635 UMKM. Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi melalui Gisela sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 2.803 UMKM. Capaian ini setara dengan 100,22% terhadap target triwulan IV tahun 2023 sebanyak 1.385 UMKM, atau setara 106,37% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 2.635 UMKM. Capaian 2.803 UMKM tersebut terdiri atas 1.972 yang terfasilitasi akses pembiayaan dengan nilai kredit sebesar Rp41,75 miliar, 598 UMKM telah mendapatkan perizinan NIB

dan 233 UMKM mendapatkan pendampingan manajemen keuangan. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, karena penghitungan indikator kinerja yang berbeda.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan IV untuk mendorong tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Sosialisasi Gisela

Sosialisasi GISELA diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2023 di Kabupaten Tulungagung, kegiatan ini merupakan sinergi kegiatan antara Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP dengan Komisi IV DPR-RI dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha kelautan dan perikanan tentang fasilitas pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh program-program pemerintah.

Potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung cukup besar, dengan jumlah poklamsar mencapai 90 kelompok yang melakukan kegiatan pengasapan, pemindangan, pemasaran dan pengolahan produk bernilai tambah dan dukungan lembaga keuangan sehingga sektor pertanian dan perikanan di Kab Tulungagung menempati urutan ke-2 terbesar penyerapan KUR sebesar 15,60% dibawah sektor perdagangan sebesar 70%. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong kreatifitas, inovasi dan rasa optimisme pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Program pelatihan dan pembinaan terhadap inovasi produk perikanan akan terus dilakukan dalam rangka pengembangan sektor KP di Kab Tulungagung agar berdaya saing.



2. Finalisasi Penyusunan Petunjuk Teknis Gerai Investasi dan Layanan Usaha dan Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka memenuhi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP, maka Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan Finalisasi Penyusunan Petunjuk Teknis Gerai Investasi dan Layanan Usaha dan Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Usaha pada tanggal 18 Desember 2023 di Depok Jawa Barat. dalam penyusunan ini selain melibatkan Tim Teknis juga

melibatkan subbagian hukum Direktorat Jenderal PDSPKP dan Auditor Inspektorat IV Inspektorat Jenderal KKP. Output dari kegiatan ini adalah terbitnya Kepdirjen PDSPKP Nomor 103 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerai Investasi dan Layanan Usaha serta Kepdirjen PDSPKP Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.30 Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Juknis GISELA dan Seleksi TPUKP

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GISELA di Kabupaten Subang dan Bandung Dalam rangka koordinasi dengan UMKM binaan Direktorat Jenderal PDSPKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat serta monitoring kinerja Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP), Tim dari Direktorat Usaha dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung pada tanggal 27-29 Desember 2023.

Koordinasi dilakukan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Subang untuk memperoleh gambaran informasi terkait profil UMKM binaan yang telah mendapatkan pendampingan dari TPUKP. Dalam hal ini TPU KP telah memberikan pembinaan dalam hal sosialisasi dan pengurusan perizinan usaha serta pendampingan dalam manajemen keuangan dan akses ke instansi terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan usahanya.



Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi Dan Layanan Usaha (Gisela) pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.573.000.000,-, hingga triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp3.568.448.000,- atau setara dengan 99,87% dari total anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 106,37% melebihi persentase realisasi anggaran sebesar 99,87%.

IK11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

Tabel 3.12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan IV tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023	TW IV	Sd TW IV	TW IV 2023	Tahun 2023	
11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usahadan investasi hulu hilir (UMKM)	2	53	2	63	100	118,87	54

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 84 UMKM, namun dengan adanya Automatic Adjustment, maka dilakukan penyesuaian target menjadi 53 UMKM. Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir hingga Triwulan IV tahun 2023 mencapai 2 UMKM yang telah memiliki sertifikat PIRT atau setara 100% terhadap target triwulan IV sebanyak 2 UMKM. Secara akumulatif, capaian indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan IV sebanyak 63 UMKM atau setara 118,87% terhadap target tahun 2023 sebanyak 53 UMKM. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2022 yang mencapai 54 UMKM, maka capaian triwulan IV tahun mengalami kenaikan sebesar 16,67%. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 kegiatan UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir belum menjadi indikator kinerja walaupun secara teknis kegiatan fasilitasi kemitraan tetap dengan capaian sebanyak 40 UMKM pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tercapai sebanyak 31 UMKM.

Fasilitasi kemitraan juga dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan sertifikat PIRT, yang diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran ke retail modern dan meningkatkan nilai kepercayaan konsumen akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk UMKM. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kemitraan Usaha yang dilaksanakan di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 6 – 8 Desember 2023, kegiatan bertujuan untuk menyaksikan panen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah bekerjasama dengan PT. Regenerasi Kehidupan Nusantara dalam hal penyediaan pupuk, terutama berbasis rumput laut.



2. Dalam rangka kegiatan Kemitraan Usaha di Kab/Kota Serang, Banten.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Serang, Perwakilan Dinas KP Kab/Kota Serang, Tangerang, Lebak, dan Pandeglang, serta peserta yang terdiri dari pelaku usaha KP (pembudidaya, pengolah & pemasar hasil KP), TPU KP dan Penyuluh Perikanan di wilayah Provinsi Banten. Acara tersebut dibuka oleh Dir. Usaha & Investasi yang diwakili oleh Katimja Pelayanan & Kemitraan Usaha.

Pada kesempatan yang sama juga disampaikan terkait rencana aksi pengembangan kampung budidaya di Provinsi Banten oleh Ditjen Perikanan Budidaya yang diwakili oleh Analis Akukultur Muda BKIL Serang Bpk Yayan Sofyan. Selain itu disampaikan juga Regulasi Kemitraan Usaha sektor KP oleh Katimja Pelayanan & Kemitraan Usaha, dan Profil Perusahaan Menengah Besar oleh QA Manager PT. Tamron Akuatik Produk Industri. Adapun melalui kegiatan tersebut telah dilakukan penandatanganan MoU kerjasama kemitraan antara PT Tamron Akuatik Produk Industri dengan 4 pelaku usaha pembudidaya dan supplier udang dari wilayah Binuangun, Pandeglang, dan Panimbang, Banten. Diharapkan melalui pertemuan tersebut sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan stakeholder khususnya di Provinsi Banten terus dibangun untuk mendorong pertumbuhan/produktifitas sektor KP yang maju dan berdaya saing serta berkelanjutan



Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp804.000.000,-, hingga triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp800.424.941,- atau setara dengan 99,56% dari total anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 118,57% melebihi persentase realisasi anggaran sebesar 99,56%.

IK12. *Startup* millennial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi

Kegiatan Startup Milenial (UMKM) menjadi Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sejak tahun anggaran 2022. *Startup* Milenial yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah *startup* yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, baik berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikelola oleh generasi milenial. *Startup* di sektor kelautan dan perikanan bergerak dalam berbagai ragam inovasi, yakni Fintech, Nanobubble, *Autofeeder*, Internet of Things (IoT) Tambak, *E-Commerce*, *Marketplace*, *Portable Pond*, dan *Water Quality Equipment*. Pembinaan *startup* sektor kelautan dan perikanan dalam rangkaian kegiatan Pengembangan *Startup* Millennial sebagian besar akan diarahkan untuk mendukung pembangunan Kampung Budidaya Perikanan, Kampung Nelayan Maju, dan lokasi perikanan strategis, melalui fasilitasi kemitraan dengan usaha *Startup millennial* dengan tujuan untuk implementasi inovasi teknologi beserta pendampingan teknis peningkatan produksi, akses distribusi/logistik, pemanfaatan fitur fintech, serta pemasaran berbasis teknologi modern untuk pelaku usaha skala UMKM di wilayah tersebut.

Indikator kinerja *startup* milenial adalah dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan. Target jumlah pelaku usaha *startup* milenial merupakan UMKM yang terdiri atas *startup* milenial yang bersangkutan dan pelaku usaha mitra *startup*.

Tabel 3.13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja *Startup* Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023	TW IV	Sd TW IV	TW IV 2023	Tahun 2023	
12	Startup Milenial (UMKM)	-	4	2	4	50	100	-

Pada tahun 2023, kegiatan pengembangan *startup* milenial semula ditargetkan sebanyak 8 UMKM, namun dengan adanya penyesuaian anggaran sehingga target tahun 2023 menjadi 4 UMKM. Capaian kinerja kegiatan ini pada triwulan IV tahun 2023 tercapai sesuai target, sehingga sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100% dari target tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2022 yang mencapai 6 UMKM, maka capaian triwulan IV tahun mengalami penurunan sebesar 33%. Hal ini disebabkan adanya Automatic Adjustment terhadap ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2023, sehingga dari target awal sebanyak 8 UMKM mengalami penyesuaian target menjadi 4 UMKM.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi dalam rangka mendukung *startup milenial*, antara lain:

Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran di Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

- a. pelaku pokdakan ikan dan pembudidaya terus menggali informasi terkait perkembangan terbaru dalam usaha budidaya, dengan harapan pengetahuan ini dapat berkontribusi pada regenerasi pembudidaya ikan. Pembudidaya menghadapi kendala berupa kurangnya oksigen dalam air terutama pada malam hari, yang menyebabkan rendahnya SR pada ikan. Selain itu, mereka juga berharap adanya akses pasar yang lebih luas di Kalimantan Barat. Untuk mengatasi masalah kurangnya oksigen pada malam hari yang berdampak pada rendahnya SR pada ikan, Banoo dan Agree akan bekerja sama dalam mengembangkan solusi teknologi yang efisien untuk meningkatkan kualitas air tambak. Selain itu, mereka akan bekerjasama dalam memanfaatkan platform pemasaran digital guna membantu pembudidaya ikan memperluas jangkauan pasar, sehingga dapat mengatasi tantangan akses pasar yang lebih luas di Kalimantan Barat.
- b. Kegiatan Pembinaan UMKM/Pokdakan Ikan Nila dan Bandeng melalui Startup ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengenalan inovasi dalam bidang usaha budidaya perikanan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya ikan di kampung budidaya Nila dan Bandeng di Kalimantan Barat, serta meningkatkan daya saing UMKM/Pokdakan ikan Nila dan Bandeng di daerah tersebut.



Gambar 3.20 Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial

- c. Kegiatan identifikasi dan verifikasi UMKM calon mitra startup dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM dan Koperasi binaan Ditjen PDSPKP dalam bidang digitalisasi dan memfasilitasi kerjasama antara UMKM dengan Startup Kelautan dan Perikanan sehingga dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan. Sehingga capaian ditahun 2023 Terdapat 4 (Empat) UMKM mitra startup, yaitu Kelompok Mulya Budidaya ikan – Sragen, Kelompok Mitra Rahayu – pembudidaya ikan patin – Sragen, Kelompok Windu Sinam – Pembudidaya Ikan bandeng - Sambas dan Kelompok Parit Pekong – Pembudidaya Ikan Bandeng - Sambas.



Gambar 3.20 Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Calon Mitra Startup Milenial di Jawa Barat

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp469.154.744,- atau setara dengan 99,80% dari total pagu sebesar Rp500.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran

sebesar Rp30.845.256,- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 93,83%.

v. Sasaran Strategis 7

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

IK13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk mencapai capaian tersebut tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Usaha dan Investasi.

Pada tahun 2023, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 4.794 orang. Capaian realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Usaha dan Investasi adalah sebesar 5.044 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau setara dengan 105,19%. Jumlah tersebut diperoleh dari tabel berikut :

No	Rincian Output	Target Output		Capaian Tenaga Kerja (orang)
1	Pengembangan Start Up Millenial	4	UMKM	65
2	Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	22	lembaga	220
3	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	317	UMKM	380
4	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha	53	UMKM	53
5	Penumbuhan wirausaha KP	533	UMKM	1116
6	Pengembangan Klaster Daya Saing (KDS) kelautan dan perikanan	2	Lembaga	20
7	Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)	2.635	UMKM	3.190

TOTAL	5.044
-------	-------

Tabel 3.14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV 2023	% Realisasi		Realisasi TW IV 2022
		TW IV	TA 2023		TW IV 2023	Tahun 2023	
13	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	4.794	4.794	5.044	105,21	105,21	4.893

Capaian tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 3,08%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan startup millennial di Kalimantan Barat
2. Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya;
3. Perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
4. Fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Fasilitasi dan pembinaan Wirausaha, Gisela, Kemitraan Usaha dan Startup Millennial bagi UMKM KP di lokasi-lokasi prioritas di seluruh Indonesia.

vi. Sasaran Strategis 8

Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

IK14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Secera teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 3.15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Terhadap Target (%)
14	Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	82,33	109,77

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Pada triwulan IV Realisasi capaian nilai WKB Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 82,33. Nilai 82,33 diperoleh dari hasil pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dikeluarkan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP melalui surat nomor T.295/ITJ.4/HP.550/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023. Apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 1,92% dari capaian tahun 2022 sebesar 80,78

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi untuk menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen

PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 3.16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	TW IV	Capaian TW IV	% thd Target 2023
15	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2	83,2	92,11	110,71

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi) tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,2. Realisasi capaian pada triwulan IV sebesar 92,11 atau setara dengan 110,71% dibandingkan dengan target tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka nilai IP ASN Direktorat Usaha dan Investasi mengalami kenaikan sebesar 6,44%.

IK16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan rewiu laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Tabel 3.17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5	83,30	103,48

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha berdasarkan hasil perhitungan adalah 83,30.

IK17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (persentase)	100	100	100

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi telah mendapatkan

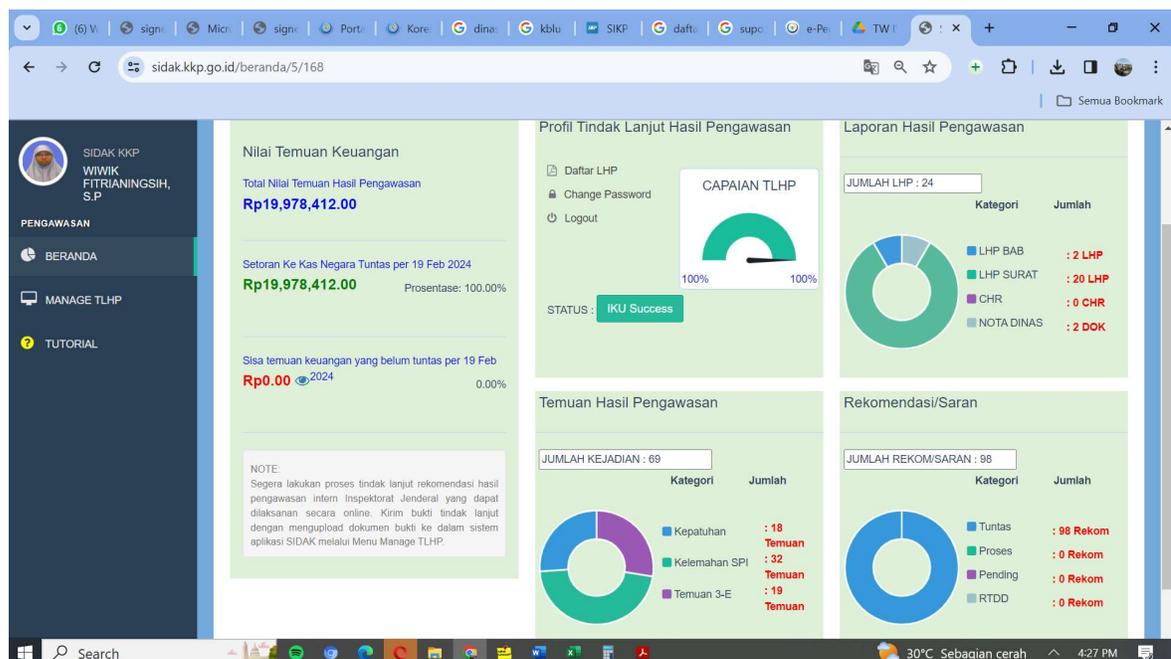
nilai IKU tersebut pada triwulan IV tahun 2023 adalah 100 UMKM atau setara dengan 100%..

IK18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan. Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV 2023 mencapai 100%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi.

Tabel 3.19. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
		2023	TW IV	Capaian TW IV	% thd Target TW IV	% thd Target 2023
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75	75	100	100	100



Gambar 3.34 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Desember 2023

Berdasarkan memorandum Nomor 3442/DJPDSPKP.0/RC.610/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Hasil Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian catatan 95 rekomendasi tuntas, 1 rekomendasi dalam tahap proses dan 2 rekomendasi dalam tahap pending. Pada akhir tahun 2023 rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan hasil 98 rekomendasi tuntas.

IK19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Dalam upaya penerapan inovasi tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Usaha dan Investasi telah mengusulkan sistem perizinan berusaha pengolahan ikan dilaksanakan berbasis risiko, post audit untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar, dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS), disingkat SI IKAN BERPROTEIN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Tahun 2022.

Tabel 3.20 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
		2023	TW IV	Capaian TW IV	% thd Target TW IV	% thd Target 2023
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi	1	1	2	120 %	120 %

Pada tahun 2023, realisasi Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 2 kegiatan, yakni mengusulkan kembali inovasi pelayanan publik SI IKAN BERPROTEIN untuk berkompetisi agar mendapatkan peringkat 99 terbesar, dan GISELA sebagai salah satu inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 100% dari capaian tahun 2022 dengan 1 inovasi.

IK20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan IV Tahun 2023, yang pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.20 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
		2023	TW IV	Capaian TW IV	% thd Target TW IV	% thd Target 2023
19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	92	92	133,33	144,92	144,92

Pada triwulan IV tahun 2023, persentase unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 133,33% atau setara dengan 144,92% terhadap target triwulan IV tahun 2023 sebesar 92%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 33,3% dari capaian tahun 2022 sebesar 100%.

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan tingkat keaktifan eselon II Direktorat Usaha dan Investasi dalam melakukan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun pengisian Manajemen Pengetahuan di Portal Coofis.

IK21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3.21 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
20	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95	99	104,21

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 95%. Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi sebesar Rp16.867.346.377,- dari total anggaran sebesar Rp.16.955.981.000,- atau setara dengan 99,48%. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 1,64% dari capaian tahun 2022 sebesar 97,87%.

IK22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3.22 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	79,69	102,82

Realisasi indikator tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 sebesar 79,79 atau setara dengan 102,82% dari target pada tahun 2023 sebesar 77,5.

IK23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.23 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	97,50	125,80

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 97,50

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan III tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2023. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat usaha dan investasi terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Dalam penyusunan peluang investasi *ready to offer* untuk mendukung pengembangan bidang hilir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara perlu dilaksanakan penguatan kelembagaan, koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Sulawesi

Tenggara dan Pemkab Wakatobi, sinergitas dengan Direktorat Teknis lain lingkup Ditjen PDSPKP untuk pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan non fisik yang diperlukan yaitu penumbuhan wirausaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan usaha, perluasan akses pasar (terutama untuk poklamsar eksisting), bimtek pengolahan untuk istri nelayan, akses distribusi/logistik ke luar Wakatobi.

2. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;
3. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Pekalongan
4. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Kelautan terkait database pelaku usaha kelautan dan perikanan di aplikasi SIKP dan data kredit sektor kelautan dan perikanan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan.

4.3. Tindak lanjut atas rekomendasi triwulan III

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan III 2023, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan selama periode triwulan IV di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 8 November 2023. Tujuan dari sosialisasi ini adalah: (a) Menambah wawasan bagi pelaku usaha atau *stakeholder*, antara lain Unit Pengolah Ikan, Pemerintah, petugas pelayanan pemerintah, serta masyarakat umum terkait meningkatkan wawasan terkait Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021; (b) Memfungsikan PTSP Pusat dan Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan informasi dan layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA untuk kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
2. Terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Tinanggea, Konawe Selatan pada tanggal 6 – 8 Desember 2023 dan Serang , Banten pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam rangka monitoring, pendampingan, dan koordinasi yang lebih intensif kepada para pelaku usaha, untuk

mengevaluasi perkembangan implementasi Kesepakatan Kerja sama kemitraan yang telah dilakukan,

3. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 10 Oktober 2023, bertempat di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Direktorat Usaha dan Investasi yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan, Kepala Cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Tegal, Camat Wonokerto, dan menghadirkan kurang lebih 120 peserta pelaku usaha perikanan yang terdiri dari: perwakilan pengolah, pemasar, dan pembudidaya ikan dari 6 Desa di Kecamatan Wonokerto (Desa Bebel, Desa Siapi-api, Desa Wonokerto Kulon, Desa Pecakaran, Desa Trateban, Desa Cijambe), dan Koperasi pengolah dan pemasar di Kecamatan Siwalan (Desa Mejasem), Camat Wonokerto, 6 Kepala Desa, petugas penyuluh bantu, serta tamu undangan Wiwiek Pujiastuti - Direktur PT. Vitosindo Inti Boga, R Ahmad Bogi Kusmaryanto - Ketua bidang industri yang Mewakili Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) DPD DKI Jakarta, dan Dudy Ilham - Dirut PT. Cahaya Putera Multirasa
4. Terlaksananya pembinaan, pendampingan, edukasi, sosialisasi dan monitoring kepada Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) secara berkala (setiap bulan) selama periode triwulan IV 2023.
5. Terlaksananya rapat koordinasi data antara Ditjen PDSPKP dengan OJK dan Kemenkeu pada tanggal 17 Oktober 2023
6. Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal PDSPKP dengan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani tentang "Sinergi Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Sektor Kelautan dan Perikanan" antara Direktorat Jenderal PDSPKP dengan PT Permodalan Nasional Madani dalam rangka percepatan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan pada rangkaian acara HARKANAS tanggal 19-21 November 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

**PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan**

Budi Sulistiyo

**PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi**

Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
	2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2. Tersedianya peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3. Peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	3
3. Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	2
4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1
5. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	22
	7. Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	2
6. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	533
	9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	317
	10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.635
	11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	53
	12. <i>Startup</i> milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	4
7. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	4.794
8. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
	15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2

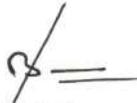
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5
	17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤0,5
	18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75
	19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
	20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
	21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5
	23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	16.955.981.000
Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023		16.955.981.000

Jakarta, November 2023

PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyono

PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
 Nomor 73/DJ.PDSPKP.2/TU.140/I/2024

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP
 Dari : Direktur Usaha dan Investasi
 Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan IV Tahun 2023
 Lampiran : Satu berkas
 Tanggal : 11 Januari 2024

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi di sektor kelautan dan perikanan, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kredit Investasi. Target yang ditetapkan adalah sebesar 5% peningkatan pelaku usaha yang merealisasikan investasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan IV 2023 telah dilaksanakan perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi tersebut sebesar 24,45%, dimana jumlah pelaku usaha yang merealisasikan investasi pada tahun 2023 berjumlah 789 pelaku usaha dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah 634 pelaku usaha.

2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan, baik yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan nonbank. Target yang ditetapkan adalah sebesar 8% peningkatan pelaku usaha yang merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan IV 2023 telah dilaksanakan perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha

dengan 110,72% dibandingkan dengan target triwulan IV sebanyak 317 UMKM.

9. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisele oleh TPUKP meliputi: (1) Fasilitasi Pembiayaan, (2) Fasilitasi Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan. Realisasi jumlah UMKM yang terfasilitasi pada triwulan IV tahun 2023 adalah 2.803 UMKM, nilai ini setara dengan 106,37% dari target sampai dengan triwulan IV sebesar 2635 UMKM.

10. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah 63 UMKM, nilai ini setara dengan 118,86% dari target sampai dengan triwulan IV yakni 53 UMKM.

11. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Target jumlah Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada tahun 2023 adalah 4.795 orang. Capaian realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Usaha dan Investasi adalah sebesar 5.044 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau setara dengan 105,19%. Jumlah tersebut diperoleh dari tabel berikut :

No	Rincian Output	Target Output	Capaian Tenaga Kerja (orang)
1	Pengembangan Start Up Millenial	4 UMKM	66
2	Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	22 lembaga	220
3	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	317 UMKM	380
4	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha	53 UMKM	53
5	Perumbuhan wirausaha KP	533 UMKM	1116
6	Pengembangan Klaster Daya Saing (KDS) kelautan dan perikanan	2 Lembaga	20
7	Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)	2.835 UMKM	3.160
TOTAL			5.044

12. Alokasi anggaran pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN untuk output masing-masing kegiatan sebagai berikut:

a. Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp655.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp651.687.343,- atau setara dengan 99,49% dari total anggaran

kelautan dan perikanan yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan tersebut sebesar 9,37%, dimana jumlah pelaku usaha yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program pada tahun 2023 sebanyak 2.205 pelaku usaha dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah 2.016 pelaku usaha.

3. Peluang investasi yang ready to offer

Dokumen peluang investasi yang ready to offer merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas. Penyusunan dokumen peluang investasi yang ready to offer sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah tercapai 3 (tiga) dokumen atau mencapai 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 3 dokumen.

4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan IV tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah tercapai sebanyak 2 kegiatan atau tercapai 100% dari target tahun 2023 yakni 2 kegiatan.

5. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 22 lembaga usaha, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan IV tahun 2023 sebanyak 22 lembaga, atau setara dengan 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 22 lembaga.

6. Lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya

Lembaga klaster daya saing merupakan lembaga usaha yang mampu menggerakkan atau mengelola kawasan klaster daya saing di lokasi tertentu. Capaian pada triwulan IV telah terealisasi 2 lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 2 lembaga.

7. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 553 UKM/wirausaha atau setara 103,75% jika dibandingkan dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 533 UKM/wirausaha.

8. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program

Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah 351 UMKM atau setara

b. Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang Ready to offer adalah sebesar Rp750.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp749.528.336,- atau setara dengan 99,94% dari total anggaran.

c. Promosi Usaha dan Investasi KP adalah sebesar Rp2.086.981.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp2.085.991.505,- atau setara dengan 99,95% dari total anggaran.

d. Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya adalah sebesar Rp781.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp769.061.342,- atau setara dengan 98,47% dari total anggaran.

e. Klaster Daya Saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya adalah sebesar Rp595.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp576.078.647,- atau setara dengan 96,82% dari total anggaran.

f. Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina adalah sebesar Rp6.675.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp6.661.914.644,- atau setara dengan 99,80% dari total anggaran.

g. UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program adalah sebesar Rp536.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp535.056.875,- atau setara dengan 99,82% dari total anggaran.

h. Start Up Millenial adalah sebesar Rp500.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp469.154.744,- atau setara dengan 93,83% dari total anggaran.

i. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) adalah sebesar Rp3.573.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp3.568.448.000,- atau setara dengan 99,87% dari total anggaran.

j. UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir adalah sebesar Rp804.000.000,- hingga triwulan IV anggaran yang terserap adalah sebesar Rp800.424.941,- atau setara dengan 99,56% dari total anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
 Catur Sarwanto

Tembusan
 Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Lampiran 3

Daftar lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya :

1. Koperasi Bumi Kartini Mina di Jepara;
2. Koperasi Mino Mulyo Abadi di Pati;
3. Koperasi Agar Makmur Sentosa di Sidoarjo;
4. Koperasi Berkah Mekar Bersama di Karawang.
5. Koperasi Pemasaran Mina Usaha Rembulan di Kabupaten Sumbawa;
6. Koperasi Produsen Mari Makan Ikan di Kabupaten Bandung;
7. Koperasi Pemasaran Pijarmas Kabupaten Demak;
8. Koperasi Poklahsar Jaya Bersama di Kabupaten Gowa.
9. Koperasi Usaha Amanah Berkah di Kota Makassar;
10. Koperasi Mitra Pangan Nusantara di Kabupaten Gowa;
11. Koperasi Pemasaran Maharani Sejalan Sehati di Kabupaten Bandung;
12. Koperasi Perikanan Selat Sempo di Wakatobi
13. Koperasi Konsumen Abadi Guyub Bersama di Kabupaten Probolinggo.
14. Koperasi Mutiara Para Mitra Sejahtera di Kabupaten Bandung
15. Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran di Kota Bandar Lampung
16. Koperasi Konsumen Wono Mina Sari di Kabupaten Magelang
17. Koperasi Bandar Kidul Maju Sejahtera di Kota Kediri
18. Koperasi Mitra Usaha Langgeng Bersama di Kabupaten Sampang
19. Koperasi Dua Bersaudara Saklawase di Kabupaten Mojokerto
20. Koperasi Karya Ayu Sejahtera di Kabupaten Sidoarjo
21. Koperasi Sri Rezeki Grup di Kabupaten Ngawi
22. Koperasi Purnama Jawa Mandiri di Kabupaten Konawe Selatan

Lampiran IV :

Data Dukung UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan

No.	NIK	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Kegiatan
1	3215234307860002	Yanti	Kecemek RT008RW003 Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
2	3215202207740001	Waryono	Dusun Muara 02 RT008RW002 Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
3	3215230712640002	WARIYONO	Pasirputih, RT016RW005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
4	3215057004870003	SULARMI RAMADHANI	Jl. Penyus Barat, RT007RW010, Desa Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap	Penerima Sertifikasi PIRT
5	3215014905960005	SRI RAHAYU RIZKI	Jl. Pepaya Guro I, RT004RW011, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
6	3215264501740002	SRIUTAMI	Bumi Karawang Permai Blok D7 No 3 RT023 RW 006, Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
7	3215052103890001	SOMAD	Dusun Walahar II, RT 007RW 002, Desa Walahar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
8	3215154203800004	RINI MARTYANING DIYAH	Perum Pratama Permai RT009RW 005, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
9	3215231407680002	RAMINOTO	Pasirputih, RT015RW005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
10	3215234503770005	ODAH	Krajan RT011RW001 Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
11	3215234409870002	NUNUNG NURAENI	Pasirputih, RT019RW 005, Desa Sukajaya, Kecamatan	Penerima Sertifikasi PIRT

			Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	
12	3215236107930003	NINING SURNATIN	Dusun II, RT003 RW002, Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
13	3215015205750008	NENI SUHAENI	Anjun Kanoman, RT003 RW005, Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
14	3215260607860003	MUHAMAD ASHARI RIDWAN	Krajan II, RT 001 RW002, Desa Tegalsawah, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
15	3215066403680002	MARYORITA	Perum PDP Blok.A3 / 07, RT009RW009, Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
16	3215136001810000	Leni Susanti Budiharto	Desa Cicinde utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
17	3215156408790004	Lela Nurlaela	Dusun Pasar Satu Rt 001 Rw 002 Desa Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
18	3173075504720005	Evi Sulastri	Jl. Semangka Raya No.27 Rt 008 Rw 006 Desa Jatipulo, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat	Penerima Sertifikasi PIRT
19	3215242305710001	Epen Ependi	Jp. Gempol Haji Rt 002 Rw 003 Desa Jayamukti, Kec. Banyusari, Kab. Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
20	3215204107550067	Encih	Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran, Kab. Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
21	3215201509900002	Andri Wijaya	Dusun Mangunkarya Rt 012 Rw 004 Desa Ciparagejaya, Kec. Tempuran, Kab. Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
22	3215235206690006	Aisyah	Pasirputih Rt 021 Rw 006 Desa Sukajaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
23	3215205507620011	Asipah	Dusun Kalenkalong Rt 013 Rw 005 Desa Sumberjaya, Kec. Tempuran, Kab. Karawang	Penerima Sertifikasi PIRT
24	NPWP 02.779.278.7- 423.000	PT. Agro Jabar	Jl. Windu No 9 Malabar Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263	MoU

25	NPWP 63.588.060.2- 901.000	PT. Regenerasi Kehidupan Nusantara	Jl. Pura Demak 7A No.1 Denpasar Barat, Bali	MoU
26	3313111708570001	Bambang Agustus	Pundungrejo Rt 03 Rw 01Jati, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah.	Penerima Sertifikasi PIRT
27	3313055011760001	RETNO NOVIANITA	Punukan Wetan RT 005 RW 010 Kel/Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
28	3313044801840001	SRI LESTARI	Sidomulyo RT 003 RW 011 Kel/ Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
29	3313095011780003	PAINEM	Dusun Mojo RT 003 RW 011 Kel/Desa Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
30	3671074209680007	HARTATI NGESTI PALUPI	Cerebonan RT 002 RW 001 Kel/Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
31	3313046608730002	PARYANTINI	Kuwon RT 003 RW 005 Kel/Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
32	3501085305810001	FITRIYANI	Sintru RT 003 RW 003 Kel/Desa Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
33	3313104101770002	RATNAWATI MINTARSIH	Buran kulon RT 008 RW 003 Kel/Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
34	3313166411910004	DESY NOVITASARI	Nerang RT 002 RW 005 Kel/Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
35		Triyoso	Nerang RT 02 RW 05, Plosorejo, Kerjo	Penerima Sertifikasi PIRT
36		Bumdes Samodra Jaya	Desa Sarang Meduro Kecamatan Sarang Kab. Rembang	MoU
37		Koperasi Mitra Mina Lestari	Desa Purworejo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kaliiori Kab. Rembang	MoU
38		Pesantren Darul Qur'an Putri	Jl. Ciantra Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi	MoU
39		Koperasi Hidayatulloh	Jl. Raya Pasar Babelan No. 46 Rt 01 Rw 01 Desa Babelan Kec. Babelan Kab. Bekasi	MoU

40		Dolici Mandiri Sukses	Perumahan Sukaraya Indah Blok D9 No.9 Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi	MoU
41		PT. Patriot Artha Global	Ruko Suncity No. 8e Kota Bekasi	MoU
42		Suparyani	Jetak Rt 02 Rw 12 Kel/Desa Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
43		Siti Yuli Fitriatun	Kuncen Rt 04 Rw 11 Kel/Desa Bolon Kec Colomadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
44		Sri Mulyani	Kauman Rt 03 Rw 07 Kel/Desa Ngasem Kec Colomadu Kab. Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
45		Praptini	Bolon Rt 02 Rw 02 Kel/Desa Bolon Kec Colomadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
46		Hani Putri Maryati	Ngemplak Rt 01 Rw 05 Kel/Desa Wonopolo Kec Tasikmadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
47		Nirvani Fitri Rosadi	Pokoh Baru Rt 04 Rw 06 Kel/Desa Ngijo Kec Tasikmadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
48		Suparmin	Sidomulyo Rt 02 Rw 06 Pendem, Mojogedang, karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
49		Wahono	Geneng Plesungan Rt 03 Rw 10 Kel/Desa karangpandan Kec Karangpandan Kab karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
50		Wiwin Ari Esti	Dompon Rt 02 Rw 08 Kel/Desa Karanganyar Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
51		Yassinta Arnanda Ilene Putri	Perum Dalem Asri Jl. Anggur No 1.20 Rt 05 Rw 21 kel/Desa Jaten Kec Jaten Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
52		Andri gunarto	Dusun Pambregan Jl Raket No 90 Rt 06 Rw 07 Malangjiwan Colomadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
53		Muhammad Heindrick	Dusun Pambregan Jl Raket No 90 Rt 06 Rw 07 Malangjiwan Colomadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
54		Suprihatin	Dusun Pambregan Jl Raket No 90 Rt 06 Rw 07 Malangjiwan Colomadu Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
55		Dian Widyawati	Jenawi Rt 02 Rw 01 Kel/Desa Jenawi kec Jenawi Kab Karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT
56		Slamet Aryadi	karangrejo Rt 02 Rw 05 kel/Desa Karanganyar kab karanganyar	Penerima Sertifikasi PIRT

57		PT Benur Top (Selfiani)	Desa Batu Putih Kec. Kolono Timur Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara	MoU
58		Koperasi Purnama Jaya Mandiri (Muh. Idrus)	Desa Akuni Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan	MoU
59		Koperasi Salo Raya (Muh. Arfan Zarkasih)	Desa Roraya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan	MoU
60		Koperasi Nur Riski Hidayah (Wahyu Waris)	Desa Lapulu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan	MoU
61		Koperasi Sitto Jaya (Abdul Muis)	Desa Panggosi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan	MoU
62		PT. Regenerasi Kehidupan Nusantara	Jl. Pura Demak 7A No.1 Denpasar Barat, Bali	Mou
63		Koperasi Padaidi Sitto Jaya	Desa Panggosi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan	MoU

Lampiran V :

Matriks SAKIP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi					Persentase Realisasi Thd Target			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan	
	2023	TW IV 2023	2024	2020	2021	2022	2023	TW IV 2023					2023	TW IV 2023
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi	5	5	5	13.46	5	-	24.45	24.45	489%	489%	489%	tidak dilakukan perhitungan karena tidak tercantum dalam PK	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	14.30
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program	8	8	8	22.8	94.16	-	9.37	9.37	117%	117%	117%	tidak dilakukan perhitungan karena tidak tercantum dalam PK	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	42.11
Peluang investasi yang ready to offer	3	3	4	-	-	-	3	1	100%	33%	25%	tidak dilakukan perhitungan karena merupakan indikator kinerja baru	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan	2	2	4	2	2	3	2	2	100%	100%	50%	3	-33%	2.25
Layanan perzinahan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	1	1	-	-	-	-	1	1	100%	100%	-	tidak dilakukan perhitungan karena merupakan indikator kinerja baru	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	22	6	45	5	12	30	22	6	100%	100%	13%	30	-27%	17.25
Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	2	2	-	-	-	-	2	1	100%	50%	-	tidak dilakukan perhitungan karena merupakan indikator kinerja baru	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina	533	183	875	40	46	201	553	203	104%	111%	23%	201	175%	175.67
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	317	17	-	-	-	2592	351	17	111%	100%	-	2592	-86%	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	2635	1385	-	-	-	-	2803	1388	106%	100%	-	tidak dilakukan perhitungan karena merupakan indikator kinerja baru	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi mitra usaha dan investasi hulu hilir	53	2	125	40	31	54	63	2	119%	100%	2%	54	17%	47.00
Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi	4	4	-	-	-	6	4	4	100%	100%	-	6	-33%	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan	4794	4794	10770	-	-	4893	5044	5044	105%	105%	47%	4893	3%	3.00

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI TRIWULAN IV 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi					Persentase Realisasi Thd Target			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan	
	2023	TW IV 2023	2024	2020	2021	2022	2023	TW IV 2023	2023	TW IV 2023	2024		TW IV 2022	TW IV 2023
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi	75	75	75	75	75	80.78	82.33	82.33	110%	110%	110%	80,78	2%	3.2
Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	83.2	83.2	87	72	86.28	86.53	92.11	92.11	111%	111%	106%	86,53	6%	8.83
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	80.5	80.5	84	-	-	-	83.3	83.3	103%	103%	99%	-	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	100	100	100	-	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	tidak ada pertumbuhan karena capaian yang diperoleh sudah maksimal	tidak ada pertumbuhan karena capaian yang diperoleh sudah maksimal
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	75	75	80	60	99	95	99	99	132%	132%	124%	95	4%	4%
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi	1	1	1	-	-	-	2	2	200%	200%	200%	-	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	92	92	94	82	100	100	133.33	133.33	145%	145%	142%	100	33%	18.41
Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	95	95	93.75	-	-	97.87	99	99	104%	104%	106%	97,87	1%	1%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	77.5	77.5	80	-	78.71	-	79.69	79.69	103%	103%	100%	-	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi
Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	77.5	77.5	80	-	90	-	97.5	97.5	126%	126%	122%	-	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun 2022 tidak ada realisasi	tidak dilakukan perhitungan karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi